

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

# KOMINFO next

Edisi 19  
Juli 2020



9 4772655 993006



## AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

# TIM REDAKSI

**Pengarah:**  
Rosarita Niken  
Widiastuti

**Wakil Pengarah:**  
Philip Gobang

**Pemimpin Redaksi:**  
Ferdinandus Setu

**Wakil  
Pimpinan Redaksi:**  
Daoni Diani Hutabarat

**Redaktur Pelaksana:**  
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur  
Pelaksana:**  
Viskayanesya

**Redaktur:**  
Frans Bambang Irawan,  
M. Taufiq Hidayat,  
Verawati

**Reporter:**  
Patricia Samantha S.  
Annisa Bonita P.,  
Yusuf

**Fotografer:**  
Agus Yudi Harsono,  
Doni Paulus Sumule,  
Sri Indrati Novinarsari  
Indra Kusuma

**Desain & Layout:**  
Adista Winda Rizka,  
Rahma Aulia Indroputri,  
Lamdza Rachmattunisa,  
Tommy Tirtawiguna

**Produksi:**  
Fahmi Trihatin J.,

# Transformasi Digital

Pada tanggal 20 dan 21 Juli 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan seminar daring dengan topik Mendorong Akselerasi Transformasi Digital. Pada hari pertama, seminar yang diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta melalui Zoom dan Youtube mengangkat sub-topik Peran Infrastruktur TIK.

Dalam pidato pembukaan seminar daring tersebut, Menteri Kominfo RI Johnny G Plate menekankan bahwa transformasi digital merupakan suatu keniscayaan dan terjadi hampir di semua sektor kehidupan. Karenanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mempercepat transformasi digital tersebut melalui berbagai program dan kebijakan. Upaya mendorong akselerasi transformasi digital sendiri membutuhkan peran dari pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Menurut Menteri Johnny, ada empat kebijakan yang sedang digagas oleh Kementerian Kominfo untuk mendorong akselerasi transformasi digital di tanah air. Kebijakan pertama adalah penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas. Kebijakan kedua: pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital. Kebijakan ketiga: pengembangan sumberdaya manusia (SDM) atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan. Kebijakan keempat: penuntasan legislasi primer dan penguatan kerja sama internasional.

Saat ini, menurut Menteri Johnny, bangsa kita sudah membangun jaringan *backbone* serat optik nasional sepanjang 348.442 kilometer yang terbentang di daratan dan lautan

Nusantara. 12.148 kilometer, diantaranya merupakan jaringan Palapa Ring yang dibangun oleh BLU BAKTI Kementerian Kominfo, dan 336.294 kilometer dibangun oleh operator telekomunikasi di Indonesia.

Lebih lanjut disampaikan bahwa infrastruktur yang kedua yang berkaitan dengan *Middle-Mile ICT Network*. Kita juga terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di jaringan *middle-mile*, melalui pembangunan jaringan *fiber-link*, *microwave-link*, dan juga satelit. Di tahun 2023 nanti diharapkan, Indonesia akan meluncurkan satelit multifungsi atau *high-throughput satellite* (HTS) SATRIA, untuk melengkapi lima satelit nasional dan empat satelit asing yang saat ini digunakan. Satelit ini diharapkan dapat menjangkau setidaknya sekitar 150.000 titik layanan publik yang saat ini belum memiliki akses internet memadai.

Seminar daring hari pertama menghadirkan 3 (tiga) pembicara: Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Prof Ahmad M Ramli, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Dr Ismail, dan Direktur Utama BLU BAKTI Anang Latief.

Di hari kedua, seminar daring mengetengahkan sub-topik: Kesiapan Ekosistem Digital dengan menghadirkan 4 (empat) pembicara: Dedy Permadi, PhD (Staf Khusus Menkominfo Bidang Digital dan SDM), Samuel A Pangerapan (Dirjen Aplikasi Informatika), Astri Wahyuni (VP Policy & Government Relations Tokopedia) dan Tricia Istiara Iskandar (VP Policy & Government Relations Gojek Indonesia).

Materi dan topik bahasan yang dibicarakan dalam dua hari seminar daring tersebut, kami racik Kembali dan kami kemas ke dalam Majalah Kominfo Next Edisi Juli 2020 ini.

*Selamat membaca*

Ferdinandus Setu  
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat



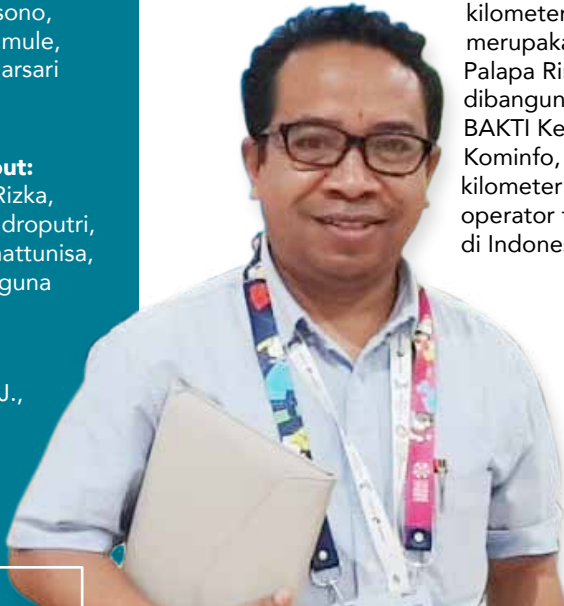
@FSetu



@FSetu



FSetu TV



# Daftar

# Isi

---

2 Surat dari MMB 9

4 Perspektif Menteri

6 Rak Buku

8 Kominfopedia

10 Teknologi & Gadget

14 Kabar RI 1

20 Liputan Khusus

27 Liputan Utama

42 Aksi Pemerintah

44 Opini

46 Progres PDP

66 Sorotan Media

78 Lintas Kominfo

88 Lawan Hoaks

## Memperjuangkan Data, Kemerdekaan dan Kedaulatannya

Akhir bulan lalu saya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dan (sedianya) Maluku Utara. Itinerary kunjungan kerja ini sangat ideal, mencerminkan dengan baik ruang lingkup pelayanan Kominfo. Ada kunjungan untuk meninjau infrastruktur (BTS dan Palapa Ring), sekaligus ada kunjungan untuk meninjau program-program untuk membangun ekosistem digital (akses internet gratis dan pelatihan bahasa Mandarin).

Begitu menginjakkan kaki di Sulawesi Utara, saya dan rombongan langsung menuju ke Kota Bitung. Kota yang tadinya harus ditempuh selama sekitar dua jam dari Manado ini, berkat adanya tol yang sudah hampir selesai, bisa ditempuh dalam waktu yang lebih singkat, di bawah satu jam.

Ada apa di Bitung? Rupanya pemerintah kotanya sudah menyiapkan lahan seluas 4,3 hektar di Kecamatan Ranowulu, dekat dengan salah satu NOC Palapa Ring Tengah, untuk pembangunan salah satu pusat data nasional. Penyiapan ini terkait dengan salah satu skenario

pembangunan pusat data nasional yang salah satunya menjagokan Bitung sebagai salah satu kandidat dari beberapa wilayah lain seperti: Jakarta, Kep Riau, dan Kalimantan Timur, sebagai calon ibukota baru.

Masih banyak yang harus dilakukan untuk memutuskan lokasi-lokasi pusat data nasional, baik di Bitung ataupun kota-kota lainnya. Yang jelas, saya sampaikan bahwa karena begitu strategisnya peran data di masa datang, maka harus banyak *checklist* yang ketat untuk menyelaksi lokasi, baik secara teknis maupun aspek-aspek pendukungnya. Syarat-syarat ketat itu adalah keberadaan jaringan akses dengan *bandwidth* yang memadai, ketersediaan catu daya listrik yang kontinyu dan stabil, lingkungan klimatologis yang mendukung, relatif bebas dari ancaman bencana alam, dan juga keterjaminan keamanan.

Pembangunan pusat data nasional sangat strategis dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Bercermin dari krisis COVID-19 ini, SPBE menunjukkan urgensinya yang sangat tinggi. Mutlak kita butuhkan untuk melangsungkan pertukaran dan pengolahan data secara lebih efisien dan terintegrasi. Apalagi penanggulangan virus Covid-19 ini sudah sangat mengandalkan penelusuran dan pengolahan data.

Kepaduan dan integrasi menjadi aspek yang tak kalah penting karena meski Indonesia memiliki lebih dari 2.700 pusat data, namun sebagian besar belum memenuhi standar global. Kira-kira hanya sekitar 3% saja yang memenuhi standar global. Sebagian besar juga belum menggunakan *cloud computing*, masih menggunakan teknologi dan sistemnya sendiri.

Tanpa terpenuhinya hal-hal tersebut maka tak akan ada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan berbasis data nasional.

Betapa pentingnya pusat data ditunjukkan dengan perhatian pimpinan tertinggi Negara Republik Indonesia ini. Selain telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 dan Nomor 95 Tahun 2018 tentang penyediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), baru-baru ini dalam rapat terbatas Perencanaan Transformasi Digital, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan langsung percepatan transformasi digital yang di dalamnya secara khusus menyinggung pembangunan dan integrasi pusat data nasional.

Orang bilang bahwa "*data is the new oil*". Artinya, data mungkin harus mengambil alih tampuk panglima sebagai komoditi baru yang sangat berharga di dunia ini, sebagaimana minyak di masa lalu. Mereka yang menguasai data, menguasai kekayaan dunia, menjadi raja-raja minyak.

Bedanya, mungkin adalah bahwa minyak merupakan sumber daya yang terbatas dan tak terbarukan. Sedangkan data tak akan pernah habis, karena praktis dalam setiap sepersekian detik muncul data baru di seluruh dunia. Hanya saja, data hanya dapat bermanfaat jika diolah dengan benar dan dapat menghasilkan informasi. Penguasanya bukan lagi raja-raja minyak yang mendapatkannya secara turun-menurun atau *given*, namun adalah mereka yang bisa mengumpulkan dan memilah menjadi bahan baku informasi yang bermakna.

Data tentang manusia adalah data yang paling berharga secara ekonomis. Dari setiap kepala dapat "diperah" data yang akan sangat bernilai bagi penyusunan strategi bisnis dan sosial. Itulah mengapa, jumlah populasi kita merupakan salah satu potensi yang sangat besar bagi data bisnis dan bisnis data, bagi data industri dan industri data. Data yang dipetik dari lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa akan sangat menggiurkan siapa saja.

Namun harus disadari bahwa anugerah kebesaran mahadata itu juga menyimpan amanat yang tak ringan. Selain harus pintar mengolahnya sebagai kekuatan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kita juga harus mewujudkan kedaulatannya. Kita harus siapkan suprastruktur regulasinya agar kita mampu mengelola data untuk kepentingan nasional dan kesatuan negara-bangsa ini.

Oleh para pahlawan pendahulu bangsa, Bumi Pertiwi sudah berhasil direbut kembali, kemerdekaan telah dikumandangkan untuk membebaskan dari kungkungan. Jika kita sering ditanya tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan, maka saya yakin bahwa mengelola dan menjaga kedaulatan data nasional adalah salah satu jawaban yang relevan dan kekinian.

“

# Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B  
Kementerian Kominfo



## Layanan Perpustakaan Kementerian Kominfo

di Masa Pandemi Covid-19



**S**elama masa adaptasi kebiasaan baru, Perpustakaan Kementerian Kominfo tidak menyediakan layanan baca di ruangan. Reservasi peminjaman / pengembalian buku dapat dilakukan dengan menghubungi: Bapak Sugeng Pramono – 08161331789

Pegawai dapat menginformasikan judul buku yang ingin dipinjam kepada Tim Perpustakaan. Jika buku tersebut tersedia, maka pegawai dapat melakukan peminjaman pada hari Senin-Jumat pukul 09.00 - 12.00 WIB

Koleksi buku dapat diakses pada <http://172.30.0.235> (menggunakan koneksi WiFi di lingkungan Kementerian Kominfo)

**Senin - Jumat  
09.00 s.d 12.00**

**Untuk reservasi pengembalian/peminjaman  
buku, dapat menghubungi :**



**Bpk. Sugeng P  
(0816-1331-789)**



Penulis :  
**Brian Tracy & Scrutzel**

### Seni Memengaruhi Orang : Menginspirasi Diri dan Orang Lain Menuju Kesuksesan

Buku ini akan menjelaskan ide-ide, strategi, dan teknik tentang ilmu memengaruhi yang telah diciptakan selama lebih dari 40 tahun dalam industri pengembangan diri. Seni ini memungkinkan Anda mendapat hasil yang luar biasa dalam berbagai hal: hubungan pribadi yang lebih bahagia, penjualan yang meningkat, hingga hubungan kemitraan yang lebih menguntungkan.



Penulis :  
**Alam Bachtiar**

### Tampil Beda dan Percaya Diri Itu Ada Seninya

Buku ini mengupas secara menyeluruh seni tampil beda dan percaya diri, di manapun tempatnya dan bagaimanapun situasinya. Menyajikan cara mengatasi kecemasan dan menumbuhkan kepercayaan diri. Buku ini juga menyajikan cara-cara agar berani tampil beda dan percaya diri.



Penulis :  
**Jefferly Helianthusonfri**

### Belajar Membuat *Whiteboard Animation* Untuk Pemula

Buku ini akan memandumu membuat *whiteboard animation* dengan mudah dan praktis. Berisi berbagai kreasi video *whiteboard animation*, mulai dari untuk keperluan infografik, video untuk konten Youtube, untuk promosi, konten media sosial, dan sebagainya.

## #kominfopedia

# 5G

Halo SobatKom! Dalam edisi KominfoPedia kali ini, kita akan membahas teknologi *Fifth Generation* atau yang lebih dikenal dengan 5G.

5G adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi berikutnya dari jaringan nirkabel. Jika teknologi 4G adalah peningkatan dari teknologi 3G dalam hal kapasitas, kecepatan dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, 5G mewakili evolusi teknologi akses radio yang ada. Jaringan 5G diharapkan dapat membangun, dan terintegrasi dengan generasi sebelumnya dari jaringan nirkabel.

*Global System for Mobile Communications Association (GSMA)* menyimpulkan dua sudut pandang mengenai teknologi 5G. Pertama, 5G

merupakan penggabungan teknologi 2G, 3G, 4G, Wi-Fi dan inovasi lain yang bermuara pada peningkatan cakupan dan kehandalan (*coverage and always-on reliability*). Sudut pandang kedua, 5G adalah teknologi yang berorientasi pada kecepatan pertukaran data dan minimalisasi *end-to-end latency* (Warren & Dewar, 2014).

Selain kedua sudut pandang dari GSMA tersebut, teknologi 5G juga didefinisikan oleh berbagai vendor teknologi maupun forum-forum di dunia. *The 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP)* mendefinisikan visi dari 5G sebagai teknologi kunci untuk dunia digital dengan *ultra-high band infrastructure* yang akan mendukung proses transformasi ekonomi di segala sektor dan meningkatkan permintaan pasar (5G PPP, 2015).



Secara keilmuan, *technical-requirement* untuk menuju 5G dapat dipenuhi hanya jika jaringan telekomunikasi tertata dengan rapi dari ujung-ke-ujung (*backbone, backhaul, access*). Saluran broadband yang memenuhi syarat *no-blankspot, low-latency, dan ultra-reliable* hanya bisa didapat jika:

- Jaringan fiber-optik tergelar merata, rapi, dengan tingkat keamanan yang cukup; dengan setting QoS yang seragam dari ujung-ke-ujung. Jumlah ruas dan simpul (node) yang minimal dan perangkat yang memiliki *low-latency*.
- Penataan spektrum frekuensi radio yang meminimalisir interferensi dan bisa mendukung tergelarnya jutaan *small-cell-BTS / RAN* berkapasitas saluran yang besar. *Mobile-access* berkapasitas besar dan merata diperlukan untuk dapat menyalurkan *high-traffic-content*, aplikasi, dan *internet of things (IoT)*.
- Setelah infrastruktur dasar berupa jaringan broadband yang merata dan ultra-handal berhasil terbentuk, maka selanjutnya negara perlu hadir untuk menata pemanfaatannya agar negara dapat memperoleh manfaat yang maksimal.

Teknologi 5G saat ini terus dikembangkan untuk dapat mengakomodasi QoS (Quality of Service) dan menunjang persyaratan lebih lanjut untuk aplikasi masa datang seperti akses *broadband* nirkabel, MMS, *video chat*, *mobile TV*, konten HDTV, *Digital Video Broadcasting (DVB)*, layanan minimal seperti suara dan data, serta layanan lain yang membutuhkan kapasitas *bandwidth* yang besar.



Ada tiga kegunaan utama skenario implementasi yang dapat didukung oleh 5G, yaitu:

- eMBB** – *enhanced mobile broadband* (konektivitas seluler yang memungkinkan peningkatan mobile broadband)
- mMTC** – *massive machine type communications* (konektivitas perangkat yang akan memungkinkan komunikasi mesin yang masif)
- URLLC** – *ultra-reliable low latency communications* (konektivitas komunikasi latensi yang handal dan rendah)

Teknologi seluler generasi terbaru ini diklaim 10 kali lebih cepat dari 4G, dengan latensi yang semakin luas. Namun masa depan 5G bukan pada *end consumer* lewat perangkat mobile. Teknologi 5G akan menciptakan peluang bagi operator jaringan untuk memanfaatkan sumber pendapatan baru dengan mengembangkan infrastruktur yang dapat memberikan berbagai layanan inovatif untuk perusahaan, termasuk aplikasi IoT (*Internet of Things*) dan integrasi konektivitas yang mendalam.

Sumber:

"KAJIAN LANJUTAN 5G INDONESIA", Puslitbang SDPPI Kemkominfo, 2016

[https://www.academia.edu/37959547/TINJAUAN\\_FREKUENSI\\_5G\\_DI\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/37959547/TINJAUAN_FREKUENSI_5G_DI_INDONESIA)

<https://www.uc.ac.id/ict/teknologi-5g/>

<https://apjii.or.id/download/file/BULETINAPJIIEDISI47Oktober2019.pdf>



# TEKNO LOGI & GAD GET

**T**erhitung lima bulan sudah sejak Presiden Jokowi mencanangkan program bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah berkenaan dengan *pagebluk* COVID-19 di Indonesia. Kebijakan ini membawa dampak dan perubahan signifikan terhadap perilaku masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) meningkat pesat dengan banyaknya pegawai kantor yang bekerja dari rumah dan juga anak-anak yang bersekolah secara daring.

Salah satu aktivitas yang menjadi primadona yaitu rapat daring dengan memanfaatkan fitur *video call* yang tertanam di program aplikasi yang tersedia di dunia maya. Sebut saja aplikasi Zoom, Google Hangout, BlueJeans, dan tak ketinggalan aplikasi besutan anak bangsa bernama CloudX.



Kehadiran kamera depan di *smartphone* dan juga *built in* kamera di laptop tak pelak menjadi faktor pendukung bagi masyarakat untuk bisa melakukan *video call* dengan mudah dan nyaman. Namun, terkadang kualitas, resolusi, bahkan fitur dari *built in* kamera di gawai belum bisa memenuhi kebutuhan. Eksternal kamera atau *webcam* menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin tampilan wajah mereka saat rapat daring maupun *video call* menjadi lebih wah.

Pada kesempatan ini, kita akan mengupas beberapa merk dan kualitas *webcam* di pasaran yang mungkin bisa menjadi pilihan SobatKom untuk meng-*upgrade* tampilanmu ketika melakukan panggilan video. Yuk kita simak!

## Logitech Streamcam

Logitech merupakan *brand* yang sudah tidak asing lagi bagi para pengguna PC dan laptop. Penetrasi produk ini tidak hanya terbatas pada *webcam* saja, namun juga produk aksesoris lainnya seperti *keyboard*, *mouse*, dan lain-lain.

Rentang harga dari *brand* ini juga sangat lebar, mulai dari harga mahasiswa sampai dengan harga "sultan". Oleh karena itu, pengguna *brand* inipun sangat beragam.

Berbicara tentang *webcam*, Logitech hadir dengan produk *flagship*-nya yaitu *Streamcam*. Dilansir dari [techradar.com](http://techradar.com), *webcam* ini memiliki resolusi full HD yaitu 1080p dengan *frame rate* bisa mencapai 60 *frame per second*. *Webcam* ini memang ditujukan bagi para *content creator* untuk bisa menghasilkan tampilan video maksimal. Tapi tentunya sah-sah saja buat Sobatkom yang ingin menggunakan *webcam* ini untuk kebutuhan rapat daring ataupun juga



melakukan panggilan video dengan teman dan keluarga anda.

Untuk memanjakan penggunanya, produk ini dilengkapi fitur seperti *Smart Autofocus* yang memungkinkan untuk melakukan fokus ke suatu objek secara cepat, mode pengenalan wajah, desain yang bisa diputar sehingga memungkinkan sobatkom untuk bisa mengambil video dalam format 9:16. Tidak ketinggalan, *webcam* besutan Logitech ini juga dilengkapi dengan stabilisator gambar dan juga *port* kekinian yaitu USB type-C untuk bisa mentransfer data secara lebih cepat dan efisien. SobatKom yang ingin meminang *webcam* ini musti merogoh kocek cukup dalam, karena produk ini dibanderol seharga Rp. 3,8 juta.

## Razer Kiyo



*Webcam ini hadir dengan desain yang unik dan berbeda. Razer yang merupakan produsen aksesoris game yang berkantor pusat di Irvine Singapura.*

*Webcam dengan resolusi full HD atau 1080p dengan selubung lampu. Lampu ini menjadi pembeda utama produk ini dengan produk lainnya. Lampu yang berjenis *ringlight* ini mampu menyinari wajah anda sehingga tampilan akan lebih bersinar dan tentunya mengatasi isu terkait dengan ruangan dengan cahaya temaram atau bahkan gelap.*

*Webcam ini menyediakan kemudahan bagi anda yang tidak ingin repot melakukan konfigurasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dibanderol dengan harga Rp. 2,18 juta, *webcam* ini cocok buat SobatKom yang memang berkecukupan dengan ruang kerja yang kurang cahaya, serta menginginkan *webcam* dengan fitur simple dan dapat diandalkan. Kamera ini juga kompatibel dengan *software livestreaming* seperti OBS dan Xsplit.*





## Ausdom

Bagi SobatKom yang menginginkan *webcam* dengan harga ekonomis namun dengan fitur dan resolusi kamera dengan kualitas mumpuni, Ausdom bisa menjadi alternatif.

Dibanderol dengan harga hanya Rp699.000, *webcam* ini bisa menampilkan resolusi video sampai dengan 1080p atau setara dengan kualitas fullHD. Tidak hanya itu, *webcam* Ausdom ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur *webcam* kelas atas seperti *microphone* dengan *noise-canceling* yang membuat suara sobatkom terdengar jelas di tengah kebisingan serta mode untuk bekerja optimal di kondisi dengan pencahayaan yang rendah.

Namun, dengan harga tersebut, tentunya ada beberapa fitur yang memang di-*downgrade* dari *webcam* ini. Kamera pada Ausdom tidak memiliki fitur untuk melakukan *autofocus*, jadi SobatKom sedikit direpotkan ketika berubah posisi karena harus menyesuaikan kembali fokus di kameranya. *Webcam* ini juga tidak dilengkapi *software* yang dapat mengoptimalkan dan mengubah pengaturan dari *webcam* ini. Kustomisasi pengguna menjadi terbatas ketika menggunakan Ausdom.

Namun, di balik kurang-kekurangan dari Ausdom, tentunya SobatKom bisa berpikir ulang ketika merujuk kembali harga dan spesifikasi yang memang cukup menggiurkan dari satu produk yang dirilis oleh perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat ini.



### Sumber :

<https://www.logitech.com/en-us/product/streamcam>

<https://ausdom.com/collections/webcams/products/ausdom-aw615-1080p-pc-webcam>

<https://www.razer.com/streaming-cameras/razer-kiyo/RZ19-02320100-R3U1>



Sebanyak delapan provinsi di Indonesia masih memiliki tingkat penyebaran Covid-19 yang tinggi. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya bergerak cepat di lapangan untuk menyikapi kenaikan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kepala Negara menekankan agar jajarannya terus berfokus pada pengujian, pelacakan, dan perawatan pasien yang terinfeksi COVID-19, utamanya di delapan provinsi yang masih memiliki angka penularan yang cukup tinggi.

# Presiden: Fokus Pada 3T dan Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

"Tetap pada perhatian kita untuk memasifkan 3T: *testing, tracing, dan treatment* dengan prioritas khusus untuk 8 provinsi yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua, (serta Kalsel)," ujarnya saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2020.

Presiden kemudian mengingatkan jajarannya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif di sejumlah provinsi. Selain itu, Kepala Negara juga kembali meminta ditingkatkannya pengujian PCR dengan menambah jumlah lab yang beroperasi di daerah, serta dengan dukungan *mobile lab PCR* sehingga target jumlah pengujian bisa tercapai.

"Kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan itu bisa tercapai 30 ribu (pengujian)," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyinggung soal diperlukannya pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi antarwilayah untuk mencegah mobilitas dan penyebaran yang lebih lanjut.

"Pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah betul-betul harus kita jadikan perhatian lagi karena *imported cases* dari luar negeri juga kita lihat meningkat," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Negara juga memandang dibutuhkan sosialisasi kembali secara masif mengenai Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan agar masyarakat kembali dan semakin meningkatkan kedisiplinannya terkait kewajiban mengenakan masker, menjaga jarak aman, dan sering mencuci tangan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mendapati adanya survei yang menyebut bahwa sekitar 70 persen warga setempat beraktivitas tanpa mengenakan masker. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih ketat dibanding sebelum-sebelumnya.

"Saya ingin mobilisasi TNI, Polri relawan, ormas, hingga tokoh di kampus semua bergerak ikut mengampanyekan ini sekaligus melakukan pengawasannya," kata Presiden.

Lebih jauh, Presiden mengingatkan agar segala upaya sosialisasi dan komunikasi tersebut dilakukan secara persuasif, komunikatif, dan partisipatif untuk mengajak serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

"Komunikasi yang membangun kepercayaan, yang berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat terutama yang rentan," tuturnya.



Kepala Negara amat memahami situasi yang dihadapi oleh para pelaku usaha tersebut di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebanyak 60 pelaku usaha mikro dan kecil dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu menerima secara langsung bantuan modal kerja dari Presiden Joko Widodo. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 21 Juli 2020.



# Presiden Akan Berikan Bantuan Modal Kerja bagi 12 Juta Usaha Mikro dan Kecil se-Indonesia

Kepala Negara amat memahami situasi yang dihadapi oleh para pelaku usaha tersebut di tengah pandemi COVID-19 ini. Penurunan omzet dagang sering kali ia dengar langsung sebagai akibat dari penyebaran COVID-19 yang nyatanya tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan saja, melainkan turut mempengaruhi sektor ekonomi baik kecil maupun besar.

“Saya tahu mungkin situasi saat ini tidak seperti situasi yang dulu-dulu yang biasanya mungkin omzetnya per hari bisa Rp600 (ribu) atau 800 (ribu), sekarang hanya 200 (ribu) atau mungkin lebih kecil dari itu. Semua merasakan dan ini tidak hanya terjadi untuk yang usaha kecil, usaha tengah juga kena, usaha besar juga kena,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden berharap agar bantuan modal kerja sejumlah Rp2,4 juta yang diserahkan langsung olehnya tersebut setidaknya dapat membantu meringankan beban yang dirasakan utamanya oleh para pelaku usaha mikro maupun kecil. Bantuan tersebut nantinya juga akan segera didapatkan oleh kurang lebih 12 juta usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.

“Ini nanti akan juga diberikan kepada 12 juta usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Tetapi Bapak/Ibu semua mengawali. Isinya memang tidak banyak, tapi saya kira bisa menambah modal kerja,” ujarnya.

Selain meringankan beban, Kepala Negara juga berharap agar bantuan modal kerja tersebut dapat membuat usaha para penerima bantuan menjadi semakin berkembang meski harus bertahan di

tengah pandemi. Maka itu penggunaan dari bantuan tersebut harus benar-benar digunakan untuk membiayai usaha mereka.

“Jangan sekali-kali tambahan modal kerja ini dipakai untuk beli HP, atau beli pulsa, hati-hati. Saya ikuti lo ini. Harus dipakai betul-betul untuk tambahan modal kerja,” tuturnya.

Salah seorang pedagang yang hadir menerima bantuan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Ia juga berharap agar bantuan yang telah diterimanya itu juga dapat dinikmati oleh rekan-rekan seprofesinya sesegera mungkin.

“Saya mewakili yang lain mengucapkan banyak terima kasih atas yang telah Bapak berikan kepada kami ini dan bisa nanti juga diberikan kepada rekan-rekan. Semoga Bapak diberikan panjang umur dan selama ini apa yang Bapak kerjakan menjadi berkah untuk semua rakyat Indonesia,” tuturnya.

Penyerahan bantuan modal kerja tersebut dilakukan dalam dua sesi pada hari ini sebagai upaya untuk mencegah kerumunan yang terlalu banyak dan dengan tetap menjaga jarak aman dan mematuhi protokol kesehatan. Para penerima bantuan tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan sebelum memasuki kompleks Istana Kepresidenan.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Situasi ekonomi global hingga kini masih berkembang sangat dinamis. Pandemi COVID-19 yang melanda setidaknya 215 negara di dunia semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia.

Meski demikian, dalam proyeksi terbaru dari lembaga global yang diperoleh Presiden, Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Namun, dalam arahnya di rapat terbatas yang membahas rancangan postur APBN Tahun 2021, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk tetap waspada dan mampu mengantisipasi setiap kemungkinan.



# Rancangan Postur APBN 2021 Harus Antisipasi Risiko Ketidakpastian Akibat Pandemi Global

"Kita tetap harus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua serta masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021," ujarnya melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 28 Juli 2020.

Dalam laporan yang diterima Presiden, OECD memprediksi bahwa pada 2021 mendatang perekonomian global akan mulai kembali pulih dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,8 hingga 5,2 persen. IMF bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang akan mencapai angka 5,4 persen.

"Saya kira kalau perkiraan ini betul kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia," kata Presiden.

Oleh karena itu, untuk dapat merancang postur APBN Tahun 2021 mendatang agar dapat menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global sekaligus memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi, Kepala Negara menekankan sejumlah hal. Pertama ialah dengan melakukan kalkulasi cermat terhadap angka-angka indikator ekonomi makro.

"Harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimistis, tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini," ujarnya.

Prioritas penggunaan anggaran dan pelebaran defisit APBN tahun 2021 mendatang juga harus berfokus pada upaya pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor. Seperti reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan percepatan transformasi digital.

Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa sumbangan APBN pada produk domestik bruto Indonesia hanya berkisar 14,5 persen. Dengan demikian, di tengah situasi pandemi saat ini, pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah untuk menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat yang diharapkan berimplikasi pada turut pulihnya sektor swasta dan UMKM.

"Dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit, tapi juga agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah dan tepat sasaran," ucapnya.

Mengakhiri arahannya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan jajarannya agar tidak melupakan agenda-agenda strategis besar bangsa Indonesia, utamanya untuk dapat terhindar dari perangkap negara berpendapatan menengah.

"Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah meraih predikat *upper middle income country*. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari *middle income trap* ini masih besar dan panjang," tandasnya.

# G20

## Digital Economy Ministerial Meeting



## Indonesia Serukan Kedaulatan dan Keamanan Data

■ Pemerintah Republik Indonesia menyerukan kedaulatan dan keamanan data dalam pertemuan puncak dari rangkaian agenda G20 Digital Economy Ministerial Meeting.

“Saya mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam G20 Digital Economy Ministerial Meeting di bawah Presidensi/Kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi. Sepanjang perundingan ini, Indonesia mengacu pada prinsip kedaulatan dan keamanan data,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai mengikuti G20 Digital Economy Ministerial Meeting secara virtual dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (22/07/2020).

Menurut Menteri Kominfo, ini merupakan pertemuan ke lima yang diikuti Pemerintah Indonesia dalam perumusan Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri. Indonesia berkontribusi aktif dalam perumusan draft deklarasi tersebut, khususnya terkait isu arus data lintas negara atau *cross-border data flow*.

“Tahun ini, Presidensi/Kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi mengangkat lima isu penting dalam Deklarasi Menteri G20 DETF 2020, yaitu: (1) Trustworthy Artificial

Intelligence, (2) Data Free Flow with Trust and Cross-border data flow, (3) Smart Cities, (4) Measurement of the Digital Economy, dan (5) Security in the Digital Economy," jelas Menteri Johnny.

Dalam perundingan di Osaka tahun 2019, terdapat beberapa prinsip mendasar terkait kedaulatan dan keamanan data yang belum masuk ke dalam G20 DETF Ministerial Declaration. "Sebagai upaya mendorong agenda tersebut, Indonesia mengusulkan beberapa proposisi yang kemudian didukung secara luas oleh negara-negara anggota G20 lainnya," jelas Menteri Kominfo.

Setelah melalui perdebatan panjang, Menteri Johnny menyebutkan ada lima proposisi Indonesia yang diakomodasi dalam G20 DETF Ministerial Declaration.

Pertama, proposisi mengenai Cross-border data flows. Menurut Menteri Kominfo, Data Free Flow with Trust merupakan salah satu agenda utama yang didorong dalam putaran perundingan sebelumnya tahun 2019 di Osaka.

"Tahun ini Indonesia mendorong penambahan agenda Cross-border data flows pada judul awal bab. Proposisi tersebut kemudian diadopsi dalam deklarasi final menjadi: Data Free Flow with Trust and Cross-border data flows," jelasnya.

Kedua, proposisi terkait The Principle of Lawfulness, Fairness, and Transparency. Menurut Menteri Johnny, berkaitan dengan prinsip *lawfulness*, Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa proses pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

"Dalam prinsip *fairness*, proses pertukaran data harus memiliki tujuan yang jelas dan valid. Sedangkan, melalui prinsip *transparency*, Indonesia menekankan pada pentingnya komunikasi dan informasi mengenai pemrosesan data yang terbuka, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh para pemilik data," papar Menteri Kominfo.

Proposisi ketiga berkaitan dengan The Principle of Reciprocity. Dalam prinsip itu, proses transfer data dapat dilakukan jika negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi, Pemroses Data Pribadi, atau organisasi internasional yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam undang-undang negara asal atau jika terdapat perjanjian internasional antarnegara.

"The Principle of Reciprocity dan The Principle of Lawfulness, Fairness, and Transparency diakomodasi, di mana negara-negara anggota G20 menyepakati proses transfer data lintas negara sesuai dengan *relevant applicable legal frameworks*, termasuk empat prinsip tersebut," tutur Menteri Johnny.

Keempat, proposisi yang diajukan ke Indonesia berkaitan dengan *Interoperability and transfer mechanism*. Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Indonesia mendorong diskusi yang lebih mendalam untuk membahas kerangka legal-formal dalam pertukaran data, terutama sebagai mitigasi jika terjadi sengketa pertukaran data antarnegara, termasuk penyalahgunaan data.

"Proposisi Indonesia diakomodasi melalui terminologi *interoperability and transfer mechanism* yang dapat menjadi titik awal diskusi mengenai sistem penyelesaian sengketa terkait pengelolaan data lintas negara," jelasnya.

Proposisi kelima berkaitan dengan Data Protection and Privacy atau dalam hal peningkatan perlindungan dan keamanan data, Indonesia menekankan pada butir "*data protection and privacy of personal data*" yang harus disikapi secara serius.

"Melalui butir ini, kesepakatan di G20 selaras dengan substansi dalam legislasi primer terkait pengelolaan data di Indonesia, yakni Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP)," jelas Menteri Johnny.

Dalam pertemuan yang diikuti oleh perwakilan 20 negara itu, Indonesia juga mengajukan dukungan keberlanjutan Digital Economy Task Force (DETF) untuk menjadi *working group*.

"Sebagai tambahan dari lima proposisi di atas, kami juga sangat mendukung keberlanjutan DETF yang akan mengupayakan kolaborasi lebih lanjut dalam sinergi ekonomi digital global," ujar Menteri Kominfo.

Menteri Johnny mengajak seluruh elemen bangsa untuk memanfaatkan pertemuan G20 untuk dalam melakukan percepatan digitalisasi di Indonesia serta kerjasama global.

"Mari bersama-sama kita manfaatkan momentum ini untuk menyongsong peran kunci Indonesia dalam kolaborasi ekonomi digital global, dengan terus mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," ajaknya.

## Lima Program Prioritas

# Mendorong Transformasi Digital

Industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini memiliki peran sentral ketika menyoal transformasi digital. Transformasi digital merupakan sebuah era dimana tumbuh kesadaran masyarakat untuk bermigrasi atau memanfaatkan ekosistem TIK dalam kehidupan sehari-hari. Wujud dari transformasi digital adalah adanya akselerasi, mendorong masyarakat konvensional menjadi masyarakat digital. Inilah yang kemudian melahirkan program-program prioritas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyiapkan Indonesia memasuki era transformasi digital.

Terdapat lima program prioritas Kementerian Kominfo dalam mendorong akselerasi transformasi digital. Jika disederhanakan, kelima program ini diibaratkan layaknya mendirikan suatu bangunan yang dibentuk dari mulai membangun fondasi hingga ke atap. Artinya, konsep membangun dari hulu (dasar) hingga ke hilir (ujung pangkal). Lima program tersebut adalah penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, kebijakan pengembangan teknologi pendukung, pengelolaan spektrum frekuensi, pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital, serta penuntasan legislasi primer dan penguatan kerja sama internasional.

## Infrastruktur TIK

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa Kementerian Kominfo terus mengupayakan percepatan transformasi digital Indonesia, salah satunya melalui penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (TIK). Program prioritas yang pertama telah membangun jaringan tulang punggung atau *backbone*. Saat ini, Kementerian Kominfo dan operator telekomunikasi di Indonesia telah membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional dengan panjang 348.442 KM di darat dan laut di seluruh nusantara.

Kementerian Kominfo juga tengah menyelesaikan *middle mile ICT network* melalui pembangunan jaringan *fiber link*, *microwave link* dan satelit. Untuk satelit, pada tahun 2023 Indonesia diharapkan akan meluncurkan satelit multifungsi (SATRIA) untuk melingkupi 5 satelit





nasional dan 4 satelit asing yang saat ini digunakan. Satelit tersebut diharapkan dapat menjangkau setidaknya sekitar 150.000 titik pelayanan publik yang belum mendapatkan akses internet yang memadai. *Deployment* infrastruktur ICT lainnya adalah *last mile ICT Network*. Di jaringan *last mile*, Indonesia memiliki 479.125 *Base Transceiver Station* (BTS) yang dibangun baik dari Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI Kominfo maupun dari operator seluler untuk mendukung jaringan *mobile broadband* dan mendorong pemerataan jaringan *fixed broadband*.

Program prioritas kedua adalah yang berkaitan dengan **Pengembangan Teknologi Pendukung**. Kementerian Kominfo menyediakan teknologi untuk pengendalian konten negatif di internet. Beberapa program yang dicanangkan diharapkan dapat mengendalikan konten negatif sehingga ruang digital dapat digunakan dengan baik, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat serta menciptakan ruang digital yang lebih bersih. Oleh karena itu, dibutuhkan penyediaan teknologi pengendalian konten agar pengendalian konten negatif bisa ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan teknologi yang lebih baik saat ini. Teknologi pendukung lainnya yang berhubungan dengan program pembangunan Pusat Data Nasional (PSN) dengan kapasitas total 43.000 *chord* dengan kapasitas penyimpanan sebesar 72 *petabytes* untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia serta integrasi, interoperabilitas dan konsolidasi data pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, juga ada Pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk menyediakan layanan *monitoring quality of service* dan *quality of experience* melalui pengukuran *real time* dengan jangkauan di seluruh wilayah Indonesia.

## Spektrum Frekuensi

Dalam rangka membangun ekosistem digital yang aman, sehat dan berdaulat, Kementerian Kominfo tengah mengupayakan penambahan dan penataan frekuensi dengan target capaian kebutuhan tambahan spektrum frekuensi sebesar sekitar 1.310 Megahertz (Mhz) dari ketersediaan spektrum frekuensi saat ini 737 Mhz. Pada tahun 2024, Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan dan menggunakan sekurang-kurangnya 2.047 Mhz untuk kebutuhan dan kepentingan pembangunan infrastruktur telekomunikasi 4G, serta persiapan dalam rangka *deployment* 5G nantinya.

## SDM Talenta Digital

Program prioritas berikutnya adalah pengembangan sumber daya manusia atau talenta digital. Program ini penting karena merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akselerasi transformasi digital. Dalam rangka mengembangkan talenta digital, Kementerian Kominfo meluncurkan berbagai program kecakapan digital dan program pengembangan ekosistem ekonomi digital. Untuk pengembangan kecakapan digital mencakup tiga tingkatan yakni tingkat dasar melalui literasi digital dari Gerakan Nasional Literasi Digital atau Siberkreasi, tingkat menengah (intermediate skills) melalui stimulus pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) dan kecakapan digital tingkat lanjutan (Advance Skill) melalui program pelatihan Digital Leadership Academy (DLA)

Sedangkan untuk pengembangan ekosistem ekonomi digital, Kementerian Kominfo menghadirkan beberapa program seperti Gerakan UMKM Go Online, Petani dan Nelayan Go Online, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan program Nexticorn atau *The Next Indonesian Unicorn*.

Program prioritas yang terakhir adalah Penuntasan Legislasi Primer dan Penguatan Kerja Sama Internasional. Kementerian kominfo terus mengupayakan pemenuhan legislasi primer di bidang telekomunikasi Informatika dan perlindungan data, yakni Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Cipta kerja di sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. Kedua RUU tersebut sedang berproses di DPR RI dan

**Sumber Foto :**

Unsplash



diharapkan dapat diundangkan dalam waktu dekat. Hadirnya dua produk legislasi primer ini diharapkan bisa menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan ekonomi digital untuk mengisi ruang ekonomi nasional dengan lebih memadai. Legislasi primer lainnya adalah Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, RPM interoperabilitas dan beberapa RPM prioritas lainnya yang ditargetkan pengesahannya di tahun 2020.

Kementerian Kominfo juga mendorong penguatan kerjasama internasional, terutama di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi digital Indonesia. upaya tersebut memastikan ekosistem digital yang aman, sehat dan berdaulat. Keseriusan dalam penguatan kerja sama ini telah disuarakan

pada berbagai forum internasional, seperti *International Telecommunication Union (ITU)* tahun 2019 di Berlin, *World Economic Forum* tahun 2020 di Davos, *Digital Economy G20* yang saat ini sedang berlangsung, dan *Asean-China Year of Digital Economic Cooperation 2020*.

Melalui lima program prioritas tersebut, Kementerian Kominfo berharap Indonesia semakin menyatukan langkah untuk mendorong akselerasi transformasi digital. Dengan demikian, mari kita menyongsong era baru, era masyarakat digital menuju Indonesia sebagai *The Digital Hub of Asia*.



## Sektor Perkantoran dan Industri Wajib Jalankan Protokol COVID-19

Berikut ini cuplikan protokol\* resmi pencegahan COVID-19 bagi sektor perkantoran dan industri dalam rangka menjalani tataran kehidupan baru yang produktif dan aman.



Cek suhu badan pekerja atau tamu di pintu masuk



Batasi waktu lembur untuk jaga imunitas tubuh



Wajib #PakaiMasker dari/ke rumah dan di kantor



Sediakan sarana cuci tangan dan *hand sanitizer*



Menjaga higienitas dan sanitasi di tempat kerja



Berikan edukasi\* COVID-19 kepada para pekerja



#JagaJarak duduk atau posisi kerja minimal 1 meter

\*protokol dan tata cara selengkapnya dapat diunduh di:  
<http://s.id/prtcovid-kantorindustri>

# Pengantar

Sudah hampir empat bulan semenjak Indonesia berjibaku melawan Pandemi COVID-19. Selama itu juga, Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi masyarakat baik bidang sosial, ekonomi, dan tentunya bidang kesehatan. Selama itu pula, Pemerintah Presiden Jokowi telah meluncurkan program-program untuk mengatasi Pandemi COVID-19 di tanah air. Program tersebut mulai dari social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan program-program bantuan bagi masyarakat seperti Kartu PraKerja, Kartu Sembako, bantuan sosial dan program bantuan lainnya dan saat ini, Indonesia sudah akan memulai untuk menjalani proses Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). AKB merupakan program agar masyarakat bisa tetap produktif serta aman dari COVID19 dengan menjalankan protokol-protokol yang telah ditentukan.

Salah satu yang menjadi program Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate saat ini yaitu yang terkait dengan Akselerasi Transformasi Digital di tengah pandemi. Program ini merupakan program yang bersinggungan langsung serta berdampak luas terhadap publik, terutama jika dikaitkan dengan bagaimana masyarakat bisa tetap produktif di masa pandemi COVID19. Dalam mengupayakan percepatan transformasi digital Indonesia, Kementerian Kominfo menjalankan program-program tersebut dengan sangat serius. Program-program tersebut yaitu (1) penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas; (2) Kebijakan pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital; (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan; (4) Penuntasan legislasi primer dan (5) penguatan kerja sama internasional.

# Infrastruktur TIK Dalam Mendukung Transformasi Digital



Transformasi digital merupakan suatu keniscayaan dan terjadi hampir di semua sektor kehidupan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mempercepat transformasi digital dengan berbagai program dan kebijakan. Upaya mendorong akselerasi transformasi digital sendiri membutuhkan peran dari pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Pembangunan infrastruktur TIK menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hadirnya infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia akan membuka akses bagi daerah dan wilayah untuk menciptakan kesempatan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk tumbuh berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, berbagai tantangan juga hadir saat pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil, mulai dari masalah geografis, infrastruktur pendukung, rendahnya literasi hingga ekonomi dan skala ekonomi.

Upaya percepatan transformasi digital terus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dilakukan melalui empat Langkah kebijakan yang dijelaskan oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat membuka Seminar Daring dengan tema “Mendorong Akselerasi Transformasi Digital” dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo Jakarta, Senin (20/07/2020).

“Kebijakan pertama adalah penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Kedua, pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital. Ketiga, pengembangan sumberdaya manusia (SDM) atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Terakhir, penuntasan legislasi primer dan penguatan kerjasama internasional,” jelasnya.

Berbagai infrastruktur TIK dalam mendukung transformasi digital dilakukan pemerintah mulai dari Proyek Palapa Ring yang menghubungkan jaringan telekomunikasi berbasis optik di seluruh Indonesia sepanjang 12.148 km yang dibangun oleh Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kemenkominfo serta 336.294 km dibangun oleh operator telekomunikasi.

Pemerintah juga berupaya membangun satelit yang diperuntukan untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau kabel, dimana pada Tahun 2023, Indonesia akan meluncurkan satelit multifungsi atau *high throughput satellite* (HTS) SATRIA yang akan menjangkau 150.000 titik layanan publik yang belum memiliki akses internet memadai. Selain itu juga dilakukan penataan spektrum frekuensi radio dengan menyiapkan penataan kembali, *refarming* untuk mengakomodasi teknologi 5G.

## Percepat Transformasi Digital, Kominfo Sebagai Orkestrator Harus Selesaikan ICT Building Block

Dalam transformasi digital, terjadi proses pindah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya, dan pindah dari yang tidak digital ke transformasi pemanfaatan digital. Proses transformasi digital sendiri akan melalui tiga tahapan. Pertama, digitasi, dimana informasi atau hal-hal yang tadinya berbentuk konvensional dipindahkan menjadi digital. Kedua, digitalisasi yaitu penggunaan TIK dalam proses bisnis untuk mendapatkan benefit dari konten yang telah terdigitasi. Ketiga, transformasi digital, dimana ini bukan lagi kesempatan tapi keharusan. Kita memanfaatkan informasi digital untuk mendapatkan keuntungan melalui perubahan cara kita beraktivitas.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail menyebutkan bahwa ada komponen dasar yang harus dibangun dalam persiapan menuju transformasi digital yaitu ICT Building Block. "ICT Building Block ini harus diselesaikan secara serentak. Tugas Kementerian Kominfo adalah menjadi orkestrator dan dirijen untuk menyelesaikannya secara serentak, dibangun secara bersama dan merata," ujarnya.

Komponen pertama yaitu infrastruktur menjadi prasyarat yang harus tersedia dahulu, karena jika tidak ada kita tidak bisa pindah ke digital. Infrastruktur ini meliputi infrastruktur aktif dan pasif yang dibangun operator telekomunikasi, termasuk perangkat yang kita gunakan. Infrastruktur dikatakan sukses jika sudah

merata ke seluruh Indonesia, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Kedua, aplikasi atau platform, di atas infrastruktur ada aplikasi/platform yang langsung digunakan masyarakat. Ketika belajar kita memerlukan aplikasi untuk belajar, begitu juga untuk aktivitas pembayaran harus ada aplikasi perbankan. Kita menggunakan aplikasi Facebook, Google, Whatsapp yang merupakan aplikasi yang kembangkan negara lain. "Ke depan akan menjadi tantangan bagi kita untuk membangun aplikasi karya anak bangsa," kata Dirjen Ismail.

Ketiga, komponen konten, Dirjen Ismail menyebut konten merupakan emas baru yang valuenya luar biasa, dimana didalamnya terdapat konten pribadi, konten ekonomi, dan konten strategis pertahanan keamanan. Selanjutnya semua tiga layer (infrastruktur, aplikasi dan konten) tersebut harus didukung oleh regulasi untuk mengatur ketiganya yang diistilahkan sebagai regulasi primer. "Jadi regulasi terkait infrastruktur, aplikasi, konten, undang-undang perlindungan data pribadi harus disiapkan," ungkapnya.

Selanjutnya adalah komponen *digital talent*, setiap komponen harus didukung oleh SDM yang harus mempunyai kapasitas dan *skill* yang cukup. Terakhir, komponen *security*, dimana di tiap layer harus aman dan

mampu menyelesaikan masalah kehidupan. Proses transformasi digital akan menjadi backfire jika tidak aman.

"Ini yang disebut ICT Building Block, semuanya harus diorkestrasi Kominfo agar bisa selesai serentak. Kita berada di situasi yang tidak bisa mundur atau menolak transformasi digital. Pembagian peran *stakeholder* harus kita jelaskan dengan baik. Kita konsentrasi pada infrastruktur karena prosesnya lebih panjang dibanding layer lain," jelas Dirjen Ismail.

Lebih lanjut Dirjen Ismail mengatakan bahwa Kementerian Kominfo memastikan bahwa semua manfaat dari pembangunan infrastruktur dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Di Indonesia, 90 persen infrastruktur bertumpu pada mobile *broadband* atau jaringan seluler yang paling cepat dibangun dan mudah dirasakan masyarakat. Sehingga harus ditopang berbagai elemen penting.

"Di sinilah salah satu tugas pokok Ditjen SDPPI dalam menyiapkan spektrum frekuensi radio. Kami menyediakan dan membaginya agar bisa dinikmati dan dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak," ungkapnya.

Infrastruktur dikatakan sukses jika sudah merata ke seluruh Indonesia, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.



## 5 Pilar Transformasi Digital sebagai Upaya Optimalkan Peran TIK

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) pilar yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan peran TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) berbasis jaringan telekomunikasi. Pertama, infrastruktur dan jaringan telekomunikasi sebagai urat nadi digitalisasi nasional. "Jika kita bicara *online shop*, bantuan tunai dengan bantuan teknologi, yang paling utama adalah adanya infrastruktur dan jaringan yang memadai," jelasnya dalam Seminar Daring "Mendorong Akselerasi Transformasi Digital – Peran Infrastruktur TIK", Senin (20/07/2020).

Pilar kedua, *Quality of Service* (QoS), infrastruktur dan jaringan telekomunikasi harus diimbangi dengan QoS. Menurut Dirjen Ramli QoS yang ingin kita bangun bukan *best quality* tapi *fitness for use*. "Apa yang sebetulnya dibutuhkan negara ini?, karena buat saya QoS jika didorong untuk itu, tapi harga mahal maka akan mengganggu penetrasi termasuk layanan ekonomi digital ke depan," ujarnya.

Pilar selanjutnya merupakan variabel yang cukup penting yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi nasional yaitu *marketplace variable primer* dan *online shop*. "Program untuk digitalisasi nasional untuk *meng-cover* seluruhnya, termasuk *online shop* yang sejak masa PSBB (red. pembatasan sosial berskala besar) ini meningkat 400%. Pengunjung mall sebanyak 3 juta orang per bulan, sedangkan pengunjung *online shop* bisa mencapai 120 juta per bulan," ungkap Dirjen Ramli.

Kurir, pos dan logistik menjadi pilar keempat yang disebutkan oleh Dirjen PPI. Layanan logistik menjamin barang yang dijual dalam *marketplace* dan *online shop* sampai ke pembeli. "Tidak mungkin *online shop* sampai ke pembeli kalau tidak ada kurirnya," jelasnya.

Pilar kelima adalah pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Jika ingin keluar dari masalah yang berat salah satunya adalah dengan memberdayakan UMKM. "Kita mendorong adaptasi UMKM ke arah digital karena UMKM yang tidak digital akan ditinggalkan," tandas Dirjen Ramli.

## Digitalisasi Nasional

Dirjen Ramli menekankan bahwa digitalisasi nasional musti dilakukan, karena semua daerah harus terdigitalisasi dan ada sinyalnya. Variabel primer pertama, adalah Jangkauan (*coverage*) dan pemerataan sinyal telekomunikasi. Dari 83.218 total desa/kelurahan di Indonesia, masih ada 12.548 yang belum terjangkau jaringan 4G. "Tidak ada alasan untuk tidak memberikan sinyal di daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah NKRI, karena itu adalah kewajiban kita semua," tegasnya.

Variabel kedua adalah *Quality of Service* (QoS), kita meminta operator telekomunikasi untuk menjaga *coverage* dan *service*. Selanjutnya adalah *levelling segmentation*, agar produk bisa terbeli dan bisa digunakan untuk mendukung ekonomi digital, seperti bagi *driver online* dan UMKM yang bisa memberi kontribusi penting bagi ekonomi nasional.

Dirjen Ramli juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa indikator industri telekomunikasi. Indikator tersebut yaitu:

- 1 Kemampuan pengembangan jaringan dan investasi
- 2 Kinerja keuangan
- 3 Jumlah pemain dan kompetisi
- 4 Posisi tawar terhadap platform dan aplikasi
- 5 *Regulatory, privacy, security, trustworthy*

## QoS dan Potret Layanan Selama PSBB

Dirjen Ramli mengatakan bahwa selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), total keluhan pelanggan yang masuk pada minggu ketiga Juni 2020 sebanyak 80.241 keluhan dan 97.92% diantaranya telah diselesaikan. "Penyebabnya antara lain keluhan umum dan gangguan layanan dimana mereka mendapat sinyal jelek, juga ada keluhan atas akurasi pemotongan pulsa," katanya.

Lebih lanjut Dirjen Ramli menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara *Quality of Service* (QoS) dengan *variabel speed*. "Kenapa kita harus bicara *speed* dan apa relasinya dengan QoS? Intinya tingkat utilisasi di BTS ditentukan oleh lebar *bandwidth*. Karena jika BTS harus digunakan begitu banyak orang, maka otomatis akan bermasalah. Kedua lebar *bandwidth* yang tersedia di sisi *backhaul*, di daerah padat seperti Jawa sudah *max load*. Solusi yang paling gampang operator tambah BTS, tapi ada kota-kota yang batasi BTS, kalau BTS terlalu banyak akan merepotkan apalagi bentuknya *tower* karena terkait dengan estetika," jelasnya.

## Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional

Kementerian Kominfo nantinya akan membuat pusat monitoring telekomunikasi nasional untuk memonitor dan berkoordinasi dengan operator terkait dengan keadaan *quality of service* penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. "Jangan sampai infrastruktur kita buat sedemikian rupa, tapi *Quality of Service* di lapangan tidak baik," ujar Dirjen Ismail.

Metode yang digunakan untuk mengukur QoS, yaitu *static test* dan *drive test*. Dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dan insidental. Pengukuran ini nantinya akan menampilkan hasil layanan *voice* dan SMS, kecepatan *download* dan *upload*, serta kualitas suara dan video pada layanan *over the top* (OTT). "Kita kirim staf Direktorat Pengendalian untuk melakukan *drive test*, ini menjadi perhatian kita karena

digitalisasi nasional ini harus dikawal," kata Dirjen PPI.

Kementerian Kominfo juga terus berusaha memastikan layanan telekomunikasi dapat berjalan baik selama masa pandemi COVID-19, terutama saat PSBB. "Kominfo terus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas internet yang diyakini mengalami lonjakan," Dirjen Ramli.

Pada akhir paparannya Dirjen Ramli juga Kembali menjelaskan mengenai *upgrade* yang telah dilakukan pada aplikasi Peduli Lindungi. "Saat memasuki *new normal*, Peduli Lindungi meng-*upgrade* fiturnya dengan menggunakan *E-passport*. *E-passport* dapat digunakan apabila masyarakat ingin melakukan perjalanan yang membutuhkan verifikasi *rapid test* atau *swab test*. Sampai saat ini pengguna aplikasi Peduli Lindungi sudah sebanyak 4,1 juta pengguna," pungkasnya.

## Dirut BAKTI: Akhir Tahun 2022 Seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia Terjangkau Layanan 4G

Pembangunan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dikatakan Direktur Utama BAKTI Anang Latif tidak hanya membutuhkan konektivitas tapi juga kualitas layanan. Hal ini terlihat dari belum meratanya kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah tertentu. Untuk itu BAKTI sebagai kepanjangan dari Kementerian Kominfo memiliki mandat untuk menyelesaikan keluhan masyarakat terkait infrastruktur TIK.

Tugas utama penyelesaian infrastruktur TIK sepenuhnya dilakukan oleh operator telekomunikasi, baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun badan usaha swasta lainnya. "Dari tahun 1990 mereka berusaha membangun dan mengoptimalkan sinyal agar bisa masuk ke desa," ujar Anang dalam Seminar Daring "Mendorong Akselerasi Transformasi Digital" – Peran Infrastruktur TIK" di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Senin (20/07/2020).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirut Anang menjelaskan bahwa jumlah

desa/kelurahan yang tidak tercakup layanan 4G sebanyak 12.548 (15%), dimana 9.113 desa/kelurahan tersebut berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). "BLU BAKTI memiliki mandat jika pembicaraan dengan Kementerian Keuangan selesai untuk membicarakan persoalan sinyal di daerah 3T tersebut. Target kita pada tahun 2022, sinyal 4G akan hadir di daerah 15% tersebut, agar masyarakatnya dapat menikmati jaringan internet secara layak dengan kualitas memadai." jelasnya.

Sedangkan sebaran desa yang belum terlayani sinyal 4G ada sebanyak 7904 desa/kelurahan dimana mayoritas ada di daerah Papua dan Papua Barat (65%). Persoalan geografi Papua menjadi tantangan utama. "Hal ini menjadi tantangan cukup besar mengingat geografi Papua dengan medan bergunung dan beberapa lokasi yang belum ada listrik. Begitu juga dengan NTT dan NTB yang terlihat banyak titik-titik merah yang perlu dihadirkan sinyal begitu juga dengan Kalimantan bagian utara dan barat," ungkap Anang.

Dari pemetaan perkembangan pembangunan BTS, Anang menyebutkan bahwa tahun ini ditargetkan sebanyak 639 desa/kelurahan 3T, tahun 2021 ada tambahan 4.200 desa/kelurahan, dan pada tahun 2022 penambahannya sebanyak 3.065 desa/kelurahan. "Sehingga di akhir 2022, semua masalah sinyal di 15% daerah tadi bisa selesai," ujarnya.

Lebih lanjut Anang mengingatkan bahwa transformasi digital akan berhasil dimulai dari hadirnya infrastruktur. Proses ini juga tidak boleh dibiarkan tanpa adanya pendampingan dan literasi digital. "Hadirnya sinyal 4G di desa jika tanpa ada pendampingan baik dari sektor kominfo, pendidikan, ekonomi dan lainnya, khawatir hal-hal negatif yang akan menguat. Sehingga seluruh sektor perlu bersinergi membangun negara kesatuan," kata Anang.

# Kesiapan Ekosistem Digital

Tak hanya pembangunan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), arah percepatan transformasi digital di Indonesia lainnya adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai digital nation. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, selain penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang menantang, saat ini Kementerian Kominfo tengah mengembangkan fasilitas ruang digital dan mendorong pembentukan masyarakat digital yang pintar.

“Banyak negara yang saat ini (ber)-transformasi ke digital nation, membentuk masyarakat yang super-smart. Semua orang harus mempunyai hak sama mendapatkan akses digital. Tanpa itu kita tidak bisa bertransformasi. Kita membangun infrastruktur supaya menyediakan ruang kegiatan dan komunitas untuk beraktivitas di ruang digital dalam bentuk aplikasi,” paparnya dalam Seminar Daring “Mendorong Akselerasi Transformasi Digital” di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (22/07/2020).

Menurut Dirjen Aptika saat ini ruang siber dan ruang fisik sudah menjadi realitas yang terintegrasi. Semua terhubung satu sama lain dengan adanya kemudahan yang bisa dimanfaatkan penggunanya. Salah satunya adalah sektor ekonomi digital.

“Ekonomi digital adalah satu cara baru ekonomi dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Sama, orang dagang bertukar melayani menjual suatu barang, tapi caranya baru, sifatnya inklusif. Semua orang bisa terlibat. Karena inklusif dan semua terlibat, kita harus berdaya saing. Supaya berkembang cara-cara memasarkan produknya, meningkatkan kualitas produk. Salah satunya UMKM, mereka butuh bantuan alternatif dari pemerintah,” jelasnya.

Pemerintah terus berupaya membantu dan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan kementerian, lembaga dan ekosistem digital untuk mendorong agar pelaku UMKM bisa berjualan di platform digital, salah satunya melalui program UMKM Go *Online*.

Menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, saat ini pemerintah tengah memetakan UMKM agar mereka bisa terlibat aktif. “Kominfo saat ini sedang memetakan bisnis UMKM seperti apa yang bisa ditunjang lewat berjualan secara *online*. Transformasi ini untuk Indonesia menuju Digital Nation yang bermatahat, berkeadilan dan berdaya saing,” tegasnya.



## 4

## Tahap Kembangkan UMKM Go-Online

Dirjen Aptika menyatakan, tidak semua bisnis yang berlangsung secara *offline* bisa dikonversi ke *online*. "Kita harus pahami dulu, yang bisa di-*online*-kan sebetulnya adalah metodologinya. Untuk itu, pemerintah membuat kebijakan yang sifatnya afirmatif guna membantu UMKM penjualan *online* agar bisa naik kelas dengan 4 cara, yaitu *on-boarding*, *active selling* (*increase transaction traffic*), lalu *scale up business*, serta *go international market-export*."

Menurut Dirjen Semuel, guna mendorong pelaku UMKM dari *offline* ke *online* pertama yang harus dikembangkan adalah memastikan UMKM ini punya produk yang konsisten kualitasnya maupun ketepatan waktu dalam *delivery*. "*On-boarding* sudah suatu hal. Kita bantu UMKM registrasi di *marketplace* sehingga mereka sudah masuk dalam bagian ekonomi digital. Tapi kita harus latih mereka supaya bisa *increase sales-nya*," jelasnya.

Saat ini, bersama platform digital, Kementerian Kominfo telah berhasil mengantarkan kurang lebih 13 juta UMKM dan IKM *on-boarding*. Namun, menurut Dirjen Aptika, tidak cukup hanya dengan *on boarding* saja. "Kalau dia sudah *on-boarding*, artinya harus diajari bagaimana jualan *online* agar bisa meningkatkan

penjualannya, bagaimana menggunakan *marketing* yang bisa dilakukan di ruang digital," jelasnya.

Menurut Dirjen Semuel, setelah *on boarding*, tahapan selanjutnya adalah *active selling*. Dilakukan pendampingan terhadap *marketplace* agar dapat meningkatkan transaksi penjualan secara *online*. "Kita melatih mereka supaya bisa *increase sales-nya*. Perbaiki produk, selalu melakukan evaluasi, dan berinovasi terhadap produk supaya bisa diterima masyarakat dan mampu bersaing," paparnya.

Selanjutnya, pelaku UMKM memasuki tahapan berikutnya dengan *scale up business*. Dalam tahap ini, Kementerian Kominfo membantu pelaku UMKM yang siap memperbesar skala bisnisnya. Biasanya dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus UMKM oleh *marketplace*.

"Jika ini dilakukan, maka kita akan bisa menembus pasar. Nah, UMKM kan nggak selamanya harus menjadi UMKM. Kita juga mempunyai program bagaimana *scale up* mereka sehingga bisa menjadi suatu industri yang berkembang baik dari segi *size-nya* ataupun dari jenis-jenis produk-produk yang mereka hasilkan," tutur Dirjen Aptika.

## Jangkau Pasar Pemerintah

Pada tahapan akhir, Dirjen Semuel menjelaskan pelaku UMKM bisa menjual produk dalam pasar internasional. Menurutnya, Kementerian Kominfo memfasilitasi UMKM yang siap menjangkau pasar internasional dengan melakukan ekspor produk melalui *marketplace*. "Kalau *scale up-nya* naik, kita dorong menjadi *go international*. Produk-produk kita bisa dijual di pasar internasional," ungkapnyanya.

Dirjen Aptika menyampaikan program UMKM dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Dan saat ini sedang dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim dan Investasi untuk menggiatkan lagi suatu kampanye bagaimana bangga terhadap buatan Indonesia," ujarnya.

Dirjen Semuel turut menegaskan pentingnya pelaku UMKM menyiapkan diri, menjaga kualitas produk sebelum masuk tahapan global. Pahalanya, ketika produk UMKM sudah ada di ruang digital, maka peluang terjual makin besar. "Harus menyiapkan diri karena persaingan yang juga kejam. Untuk itu perlu konsistensi dari mutu produk barangnya. Harapannya nanti, karena ini sifatnya *market global*, yang namanya ekonomi digital kalau kita sekali masuk ke ruang digital produk kita bisa dilihat oleh seluruh dunia," ungkapnyanya optimistis.

## Akselerasi Layanan Pemerintah

Transformasi digital sektor pemerintah pun turut dikembangkan. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abriyani Pangerapan menyatakan, saat ini pemerintah tengah mengembangkan sistem manajemen kerja instansi yang transparan dan akuntabel.

“Untuk menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dirjen Semuel menuturkan, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik tersebut

meliputi *e-planning*, *e-budgeting*, *e-proc*, *e-payment*, *e-monev*. Sedangkan untuk Satu Data Indonesia (data pembangunan yang berkualitas) sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, mengatur tentang data statistik berupa data dasar, sektoral, dan wilayah; *data geospasial*, *big data*, *data real time*, serta *data e-commerce*.

Dirjen Semuel menyontohkan ada beberapa aplikasi yang telah dikembangkan. “Kita siapkan komputasi awan, *government cloud*, bagaimana supaya koordinasi jaringan antar pemerintah (berjalan) baik, *secure*. Kita juga siapkan aplikasinya supaya kita dapat beraktivitas dalam melayani masyarakat,” tuturnya.

Menurut Dirjen Aptika, ada beberapa aplikasi yang bersifat umum dengan data strategis yang akan dikelola sendiri pemerintah. Selebihnya pemerintah akan bekerja sama karena besarnya kebutuhan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik tersebut.

Pemerintah juga tengah mendorong layanan elektronik terpadu dengan menggunakan pembayaran *cashless*. “*e-planning* menjadi satu, *e-budgeting*, *e-proc*, *e-payment*, di pemerintah akan menyediakan *cashless*. Kami sudah memikirkan bagaimana membangun (aplikasi) super e-pemerintah bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain pengembangan aplikasi di sektor pemerintahan, Kementerian Kominfo juga mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mendorong pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat di sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata.

“(Aplikasi) pendidikan kita nomer satu. Kesehatan, *telemedicine* sudah mulai tumbuh. Agrikultur sudah banyak berbasis digital. Kemaritiman, pariwisata dan logistik. Inilah riset-riset yang kami dorong supaya terjadinya inovasi-inovasi layanan,” papar Dirjen Aptika.

## Aplikasi Super Layanan Pemerintah

Menyoal integrasi layanan publik, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono di tempat terpisah menjelaskan, Kementerian Kominfo memfasilitasi dan mempermudah masyarakat agar bisa mengakses layanan perizinan pemerintah tanpa harus mendatangi berbagai Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah, baik di pusat maupun daerah untuk mengurus izin yang dibutuhkan.

“Dari 34 kementerian dan 30 kementerian teknis, ditambah lembaga pemerintah yang memberikan, ada begitu banyak layanan yang saat ini masyarakat harus mengakses secara satu per satu. Tetapi sekarang sudah ada sistem *online single submission* secara nasionalnya,” tuturnya.

Menurut Direktur Bambang, saat ini terdapat sekitar 75 kementerian dan lembaga yang sudah menyediakan pelayanan publik secara *online*. Namun demikian, meski layanan di beberapa K/L bersifat sama dan terintegrasi, menurutnya kesiapan pemerintah menyediakan sebuah layanan terpadu tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.

“Eksekusi di daerah, masih harus datang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini masih menjadi satu kendala yang akan kita

hadapi bersama termasuk soal konsep integrasi data pada program Pra-Kerja,” ungkapnya.

Oleh karenanya pemerintah kini tengah menyiapkan pelayanan publik melalui *super apps* dalam satu aplikasi yang bisa diakses bersama, termasuk pada program Pra-Kerja nantinya. “Jadi, kami ingin masyarakat tidak perlu mengunjungi banyak situs, melainkan cukup mengakses dengan sistem terpadu. Inilah ‘pekerjaan rumah pemerintah’, untuk bisa memastikan bahwa seluruh data bisa terintegrasi antarlembaga, antarsektor, sehingga kualitas pelayanan publik kita bukan hanya sekadar bisa diakses, tapi bisa diakses secara terpadu,” tutupnya.



## Bangun Pusat Data Nasional

Untuk mendorong implementasi *e-government*, Kementerian Kominfo juga saat ini sedang mempersiapkan Pusat Data Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 dan Nomor 95 tahun 2018 tentang Penyediaan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam kunjungannya ke Bitung, Sulawesi Utara, mengungkapkan, meski Indonesia memiliki lebih dari 2.700 pusat data, sebagian besar tidak memenuhi standar global.

“Hanya sekitar 3% saja yang memenuhi. Sebagian besar juga belum menggunakan *cloud computing*, masih menggunakan TIK *ethernet* dan sistemnya sendiri,” tuturnya ketika berkunjung melihat kesiapan pembangunan Pusat Data Nasional di Bitung, Selasa (28/07/2020).

Hal itu berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulitnya mengambil keputusan berbasis data nasional. “Untuk itu, Presiden Jokowi Widodo juga menetapkan di samping membangun Pusat Data Nasional, Indonesia juga harus memiliki Satu Data Nasional,” ujarnya.

Bitung merupakan satu dari empat lokasi yang rencananya akan menjadi titik pembangunan Pusat Data Nasional. Tiga lokasi lainnya yaitu DKI Jakarta, Natuna, Kepulauan Riau, dan ibukota negara yang baru, Kutai Kartanegara/Penajem Passer Utara.

Menteri Johnny juga menekankan, data akan menjadi sangat strategis sehingga pusat datanya pun harus memenuhi prasyarat strategis, di antaranya syarat-syarat geologi yang juga harus didukung infrastruktur penunjang *power supply* yang memadai.

“Rencana besar ini harus diikuti dengan rencana detil, karena secara nasional Indonesia sudah terhubung melalui backbone *fiber optic*. Kalau data kita tidak dikelola dengan baik, maka bisa berpindah tangan lintas negara. Mereka dapat mengetahui kekuatan serta secara khusus kelemahan bangsa kita di masa akan datang,” tutupnya.

# Era Digital

## Kominfo Siapkan Talenta SDM Lewat Program DTS



Era digital saat ini telah menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Selain kebutuhan infrastruktur TIK, sumber daya manusia (SDM) atau talenta digital juga menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan industri.

“Guna membangun sebuah kawasan industri diperlukan percepatan dan peningkatan pengetahuan SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), agar dapat menutupi kekurangan *Digital talent* di Indonesia

secara umum,” jelas Kepala Balitbang SDM Kementerian Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar dalam Webinar TIK-Talk#20 “Akselerasi Talenta Digital Indonesia di Era Next Normal”, Kamis (23/07/2020).

Kabalitbang Basuki menyebutkan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi

Publik (Puslitbang Aptika-IKP) Kementerian Kominfo pada tahun 2019, dibutuhkan 129.465 SDM di bidang TIK pada tahun 2020. Artinya, masalah utama bagi para eksekutif SDM saat ini adalah kelangkaan mendapatkan talenta digital yang berkualitas.

Sementara itu, kebutuhan industri terhadap tenaga kerja TIK berjumlah 323.662 orang. Angka tersebut mempertimbangkan profesi dengan kebutuhan keterampilan menengah-tinggi, atau setara dengan S1 ke atas. Sedangkan kondisi supply dan demand SDM TIK di Indonesia yang memproyeksikan lulusan TIK di Indonesia berjumlah 431.899 orang pada tahun 2020. Lalu, kebutuhan SDM bidang TIK di Indonesia secara global rata-rata 600.000 orang per tahun.

“Angka kebutuhan tersebut hanya mempertimbangkan profesi dengan keterampilan menengah tinggi atau minimal level S1. Itu artinya standar makro yang kita keluarkan dan standar mikro yang dibutuhkan perusahaan tidak terpenuhi karena adanya gap,” ujar Kepala Badan Litbang SDM Kominfo.

## Atasi Kesenjangan Digital Lewat DTS

Lebih lanjut, Kabalitbang Kominfo menuturkan, salah satu yang menjadi tantangan adalah menciptakan kualitas SDM di Indonesia atau yang disebut sebagai kesenjangan ekspektasi industri dengan lulusan perguruan tinggi maupun sekolah kejuruan.

“Oleh karena itu, Kominfo sejak beberapa tahun terakhir mengadakan program beasiswa *Digital talent* Scholarship untuk membekali talenta digital di Indonesia. Program ini bisa diikuti oleh lulusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan,” imbuhnya.

Program *Digital talent* Scholarship ini bermaksud untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mendukung transformasi digital di Indonesia menuju revolusi industri 4.0. Kabalitbang berharap Indonesia bisa melalui transformasi digital terlebih dulu sebelum masuk ke revolusi industri terbaru agar lebih siap.



“Melalui Program DTS 2020 *Online Academy*, Kominfo memberikan beasiswa pelatihan dan sertifikasi bagi peserta terpilih untuk meningkatkan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi,” kata Kepala Badan Litbang SDM.

Menurut Kepala Badan Litbang SDM, sistem pelatihan *online* ini diadakan sebagai bentuk dukungan Kominfo di tengah pandemi, bahwa COVID-19 tidak akan menjadi penghalang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang TIK. “Kondisi seperti ini tidak menghambat atau mencegah kita untuk melakukan

pembelajaran dari rumah. Program DTS ditujukan untuk pengembangan SDM TIK agar mampu memasok keahlian yang diperlukan dalam era digital bahkan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran,” tandasnya.

## 2 Batch Dengan 8 Tema Pelatihan

*Digital talent* Scholarship 2020 merupakan upaya pemerintah untuk membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan selama masa pandemi. “Batch 1 sudah dimulai pada minggu kedua April 2020. Kemudian, untuk Batch 2 digelar pada Mei 2020 dan dibuka bagi mereka yang tidak lolos di tahap pertama. Tapi, bagi yang sudah pernah diterima

dan mengikuti pelatihan Batch 1 tidak dapat lagi ikut Batch 2. Untuk memberi kesempatan kepada yang lain,” jelas Kabalitbang Basuki.

Menurut Basuki, *Online Academy* Batch 2 digelar dengan dukungan *global technology company* seperti Dicoding, Facebook, Google, Microsoft dan Progate. “Materi pelatihan sudah disiapkan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan *global technology company*. Peserta *Online Academy* akan belajar secara daring, mengatur waktu belajar secara mandiri dan terjadwal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” jelasnya.

Dalam pelatihan tersebut, nantinya peserta dapat memilih delapan tema yang disediakan, yaitu Associate *Cloud Engineer* (Google), *Digital Skills* (Microsoft), *Android Developer* (Dicoding), *iOS Developer* (Dicoding), *Augmented Reality* (Dicoding), *Programming: HTML, CSS, Javascript* (Progate), *Digital Entrepreneurship* (Google), dan *Digital Entrepreneurship* (Facebook).

Tahun 2020, Program DTS ditargetkan menjangkau 60 ribu orang peserta dari seluruh Indonesia. Selain *Online Academy*, dalam Program DTS terdapat *Fresh Graduate Academy*, *Vocational School Graduate Academy*, *Coding Teacher Academy*, dan *Thematic Academy*. Lalu di tahun 2020, program DTS ditambah dengan *Regional Development Academy* dan *Digital Entrepreneurship*.

Kementerian Kominfo juga menyiapkan pendampingan dan aplikasi *Simonas* agar dapat memfasilitasi bertemunya talenta digital dengan peluang kerja dan usaha di berbagai perusahaan teknologi atau peluang wirausaha lainnya. Informasi lebih lanjut terkait dengan Program DTS 2020, dapat diakses melalui tautan <https://digitalent.kominfo.go.id/>

# LIPUTAN UTAMA

## Kesiapan Ekosistem dalam Transformasi Digital:

# Perspektif Gojek

Upaya pemerintah dalam percepatan transformasi digital di Indonesia melalui pengembangan ekosistem turut didukung oleh berbagai *stakeholder* terkait, termasuk dua unicorn Indonesia, Gojek dan Tokopedia. Di tengah pandemi COVID-19, ekonomi digital tumbuh pesat sebagai salah satu penopang perekonomian negara. Salah satu sektor yang tumbuh pesat adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keterbatasan ruang gerak masyarakat sejak pandemi COVID-19 membuat perilaku masyarakat bergeser menjadi serba "*online*", di mana transaksi berbasis digital meningkat lebih dari dua kali lipat. Sebut saja pemesanan makanan melalui aplikasi daring yang diantarkan langsung oleh *driver* yang menjadi mitra Gojek Indonesia.

Menurut data tahun 2020, transaksi Go-Food (pemesanan makanan secara *online* dalam aplikasi Gojek) meningkat hingga 3x lipat di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, selama Ramadan 2020 lalu, jasa pengantaran barang meningkat hingga 103%. Vice President of Public Policy and Government Relations Gojek, Tricia Istiara Iskandar mengatakan, hal ini

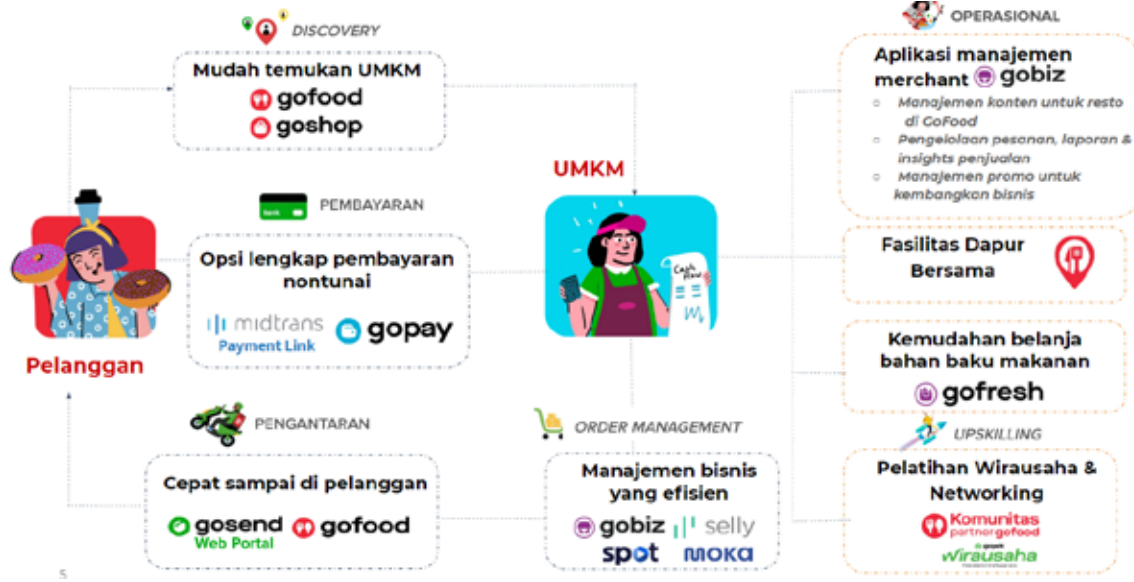
menunjukkan Indonesia sudah siap memasuki transformasi digital dengan dukungan data pengguna aplikasi Gojek.

"Gojek lahir untuk memberikan solusi dan kemudahan pada masyarakat Indonesia. Kami sudah beroperasi di 215 kota di Asia Tenggara dan aplikasi Gojek sudah diunduh lebih dari 170 juta orang. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sudah siap untuk memasuki transformasi digital," jelas Tricia dalam seminar daring bertajuk "Mendorong Akselerasi Transformasi Digital: Kesiapan Ekosistem Digital", Jakarta, Selasa (21/07/2020).

Tricia juga menjelaskan bahwa ekosistem dalam aplikasi Gojek sudah membantu jutaan UMKM untuk terhubung dengan platform *online* melalui layanan Go-Food dan Go-Shop. Hal ini dibuktikan dengan inovasi yang dilakukan oleh pihak Gojek untuk menjaga volume transaksi dan arus pendapatan UMKM sebagai mitra mereka. "Sebagai *super app* kami siap mendukung transformasi digital, secara *end-to-end* khususnya untuk pelaku UMKM, supaya ekosistem kita lebih digital," tambah Tricia.

Saat ini, sudah hampir 100 ribu pelaku UMKM yang sudah *go digital* dan Gojek sangat terbuka pada semua pelaku UMKM. Gojek juga berkomitmen untuk terus mendukung UMKM Go-Online yang sejalan dengan program dari Kementerian Kominfo, dengan memfasilitasi pedagang pasar untuk menjadi bagian Go-Shop yang mempermudah pembeli melakukan aktivitas pembelian.

"Dari sisi Gojek kami sangat terbuka dengan UMKM seperti UMKM kuliner, itu proses *on boarding* nya sangat mudah dan gratis. Kami (juga) sangat terbuka untuk para UMKM yang belum bergabung," jawab Tricia saat menjelaskan solusi Gojek agar semua UMKM terhubung dengan ekosistem digital.



## Perspektif Tokopedia dalam Persiapan Transformasi Digital Indonesia

Dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia, dibutuhkan peran lebih dari masing-masing *stakeholder* yang berada dalam ekosistem digital tersebut. Bukan untuk berkompetisi, namun berkolaborasi antara pihak pemerintah dengan swasta untuk dapat membuat terobosan-terobosan yang tepat sasaran.

Salah satunya melalui kolaborasi yang dilakukan oleh Tokopedia. Tokopedia membantu jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berjualan secara daring sebagai bentuk nyata untuk mengembangkan perekonomian digital pada beberapa sektor yang terkena imbas penurunan pendapatan di tengah pandemi COVID-19.

Astri Wahyuni, Vice President of Public Policy and Government Relations Tokopedia menyampaikan bahwa Tokopedia memiliki strategi dan peran tersendiri dalam menghadapi transformasi digital.

"Tokopedia menjadi salah satu bagian transformasi digital dengan misi mendorong pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Saat ini sudah ada lebih dari 8,6 juta UMKM yang berjualan di Tokopedia. Peran kami dalam menumbuhkan ekonomi digital dengan bekerja sama bersama pemerintah dan

menjadikannya digitalisasi layanan publik," kata Astri dalam seminar daring "Mendorong Akselerasi Transformasi Digital: Kesiapan Ekosistem Digital", di Jakarta, Selasa (21/07/2020).

Selain itu, untuk mendukung peran pemerintah meningkatkan akselerasi transformasi digital pada UMKM se-Indonesia, Tokopedia juga menjadi partner dari program UMKM Go-Online yang digadang Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo bernama "Grebeg Pasar". Hal ini juga dilakukan Tokopedia sebagai langkah untuk mendukung pemerataan akses pasar melalui platform digital.

"Tokopedia bekerja sama dengan (berbagai) kementerian di Indonesia, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam program UMKM Go-Online "Grebeg Pasar" yang mendukung pemerataan akses pasar melalui platform digital," tambah Astri.

Selain bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, Tokopedia juga pernah membantu program Pajak Daerah untuk layanan pembayaran e-samsat yang sudah tersedia di tiga provinsi (Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah), dukungan pada program Kementerian Perdagangan dalam

rangka Hari Konsumen Nasional 2019 dengan memberikan promo dan edukasi perlindungan konsumen di media sosial, hingga program e-smart industri kecil dan menengah (IKM) hasil kerja sama dengan Kementerian Perindustrian, yang berhasil menjadi 848 IKM sektor FnB, Fashion, Kriya.

Akselerasi transformasi digital Tokopedia terhadap UMKM dilakukan melalui program unggulan Tokopedia Center yang telah berdiri di 41 desa dan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). "Tujuan kami dalam program Tokopedia Center adalah mentransformasi pasar konvensional menjadi pasar digital," tambah Astri.

Saat ini, sudah ada 2 juta Mitra Tokopedia yang bergabung, dan pasar tradisional *online* sudah dilakukan di Tasikmalaya. Penjual sudah melakukan penawaran barang dagangannya kepada masyarakat dan mitra Tokopedia sehingga warung-warung kecil bisa bersaing dengan toko modern lainnya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa ekosistem di Indonesia sudah siap dengan adanya transformasi digital.

"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk UMKM bergabung kepada kami (Tokopedia) karena dengan filosofi kami yaitu #MulaiAjaDulu. Begitu banyak pendamping dan modul-modul pelatihan yang bisa diakses dengan gratis oleh para UMKM," ujar Astri.

## Indonesia Digital Nation

*(Bermartabat, Berkeadilan, Berdaya Saing)*

Peta jalan yang terdiri dari upaya penyediaan infrastruktur, pembuatan aplikasi, kesiapan regulasi, pengendalian konten, riset dan inovasi, hingga adopsi teknologi penunjang. Menekankan pada transformasi pemerintah digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.

## Palapa Ring

Proyek pembangunan jaringan tulang punggung internet cepat nasional. Merupakan kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T). Menghubungkan 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia.

## SATRIA

Satelit Indonesia Raya. Targetnya akan diluncurkan di tahun 2023. Hadir melengkapi lima satelit nasional dan empat satelit asing yang saat ini digunakan. Diharapkan dapat menjangkau 150.000 titik layanan publik yang belum memiliki akses internet

## HTS

*High-throughput satellite.* Teknologi satelit telekomunikasi (transponder) yang mampu memberikan layanan internet pita lebar (*broadband*) dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibanding satelit konvensional.





## Refarming

Proses penataan ulang pita frekuensi radio. Proses ini menghasilkan penetapan pita frekuensi radio yang berdampingan (*contiguous*), sehingga operator seluler dapat meningkatkan layanan teknologi seluler secara optimal.

## Pusat Data Nasional

Rencana pembangunan infrastruktur pusat data, berkaitan dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Akan dibangun di empat lokasi, yaitu Jakarta, Kabupaten Penajam Paser Utara, Natuna-Kepulauan Riau, dan Bitung-Sulawesi Utara. Ditargetkan beroperasi pada tahun 2023.

## QoS

*Quality of Service*. Metode pengukuran tentang seberapa baik kualitas data pada jaringan bergerak seluler, dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu servis.

## QoE

*Quality of Experience*. Kualitas layanan telekomunikasi seluler dari sudut pandang pengguna. Parameter yang mempengaruhi: kualitas konten video / audio pada sumbernya, QoS yang merujuk pada pengiriman konten melalui jaringan, dan persepsi manusia yang meliputi harapan dan suasana.

## OSS

*Online Single Submission*, atau disebut juga dengan Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). Merupakan upaya penyederhanaan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan yang terintegrasi.

## DTS

*Digital talent Scholarship*. Program beasiswa pelatihan intensif dari Kementerian Kominfo untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi di era Industri 4.0

## Unicorn

Sebutan bagi perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari USD1 miliar (setara Rp14 triliun). Pertama kali dikenalkan oleh Aileen Lee, investor pendiri Cowboy Ventures di tahun 2013. Istilah unicorn diambil dari spesies kuda mitologi, merepresentasikan status yang langka dan mustahil/sulit dicapai.

## On-Boarding

Peralihan aktivitas bisnis UMKM ke ruang digital dan menjadi bagian dari ekonomi digital. Merupakan satu dari 4 tahapan dalam Gerakan UMKM Go Online. Tiga tahapan lainnya: *active selling & increase transaction traffic*, *scale up business*, dan *go international market-export*.

### Referensi:

[kominfo.go.id](https://kominfo.go.id)

- <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/snki/article/view/2649/1229>

- <https://tirta.id/mengenal-unicorn-decacorn-dan-hectocorn-dalam-startup-dhk9>

# Proteksi Masyarakat, Pemerintah Siapkan Vaksin COVID-19



Pemerintah Indonesia berupaya menyediakan proteksi kepada masyarakat dengan memproduksi atau menyediakan vaksin COVID-19 yang aman, tepat, dan cepat. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Prof. drh Wiku Bakti Bawono Adisasmito MSc, PhD, menyampaikan bahwa berbagai inisiatif kerja sama telah dilakukan terkait dengan vaksin, salah satunya kerja sama antara Bio Farma dan Sinovac yang sekarang sedang melalui proses uji klinik fase tiga.

“Harapannya nanti akan bisa selesai dalam waktu yang memadai dan produksinya nanti bisa dilakukan,” ujar Jubir Wiku dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jumat (24/7/2020).

Jubir Satgas COVID-19 tersebut menyatakan bahwa dalam rangka kerja sama ini, juga terdapat inisiatif-inisiatif lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka kemandirian bangsa. “Sudah pasti bahwa kita menginginkan bahwa produksi vaksin akan dilakukan oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia sementara ini PT. Bio Farma, sebuah BUMN, demikian juga ada rencana dengan pihak swasta yaitu PT. Kalbe dan nanti tentu akan berkembang dengan berbagai alternatif dan potensi lainnya di Indonesia,” kata Wiku.

Lebih lanjut, Jubir Wiku menjelaskan bahwa dalam pembuatan vaksin ini juga dibentuk tim pakar di bidang vaksin dan obat untuk memastikan bahwa kandidat vaksin yang dibuat betul-betul sesuai dan cocok untuk kepentingan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, pada Selasa (21/07/2020), Presiden Joko Widodo menerima tim uji klinis vaksin COVID-19 dari Fakultas Kedokteran Unpad beserta pihak Bio Farma dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Istana Merdeka Jakarta. Presiden menyatakan mendukung fase uji klinis yang akan dilakukan terhadap vaksin untuk COVID-19 dan siap memberikan bantuan dukungan dan sarana yang diperlukan.

Uji klinis vaksin COVID-19 tersebut saat ini sudah berada pada tahap ketiga dengan melibatkan 1.620 sukarelawan. Hasil uji klinis tersebut nantinya akan dibandingkan dengan hasil uji klinis yang sama di berbagai negara. Menurut Kepala Tim Uji Klinis dari FK Unpad, Prof. Kusnandi, uji klinis ditargetkan selesai bulan Januari 2021 mendatang.

Sementara itu Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, memastikan bahwa proses dan protokol fase uji klinis tersebut akan mendapatkan pendampingan ketat dari pihaknya. Selain itu, BPOM juga akan mempercepat pemberian izin edar apabila vaksin tersebut dinyatakan lolos uji klinis.

## Tiga Prioritas

Dalam pengembangan vaksin, Pemerintah Indonesia memprioritaskan tiga hal penting, yaitu aman, tepat, dan cepat. Menurut Jubir Satgas COVID-19, yang dimaksud dengan aman adalah vaksin tersebut harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dan tidak ada efek samping. “Harus tepat, artinya betul-betul vaksin tersebut bisa menimbulkan kekebalan spesifik pada virus yang beredar di Indonesia,” ujarnya.

Sementara untuk pengertian cepat, artinya karena kondisi yang dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia, harus betul-betul cepat untuk bisa melindungi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, seluruh tes vaksin termasuk uji klinis tidak hanya terlaksana dengan cepat tapi juga benar. “Dalam konteks cepat harus bisa diproduksi juga dengan baik dan dalam jumlah yang memadai untuk betul-betul dapat memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia yang perlu diberikan perlindungan,” jelas Wiku.

Sumber :

<https://setkab.go.id/persiapkan-vaksin-covid-19-aman-tepat-dan-cepat-pe-merintah-berusaha-proteksi-masyarakat/>

<https://covid19.go.id/pi/berita/presiden-jokowi-dukung-penuh-fase-uji-klinis-vaksin-covid-19>

# APA SAJA ISTILAH BARU TERKAIT KASUS COVID-19?

## Kasus Suspek

- + Baru pulang dari wilayah transmisi lokal
- + Pernah kontak dengan kasus konfirmasi/probable
- + Menderita ISPA

## Kontak Erat

- + Pernah kontak langsung dengan kasus konfirmasi/probable

## Kasus Probable

- + Kasus suspek dengan ISPA/sakit kritis/kematian yang belum ada hasil PCR

## Kasus Konfirmasi

- + Hasil PCR positif
- + Terbagi 2, kasus konfirmasi dengan gejala dan tanpa gejala

Tidak ada lagi istilah PDP, ODP, dan OTG.





# ANTIOKSIDAN & ANTIWONGEDAN



Opini

FX Bambang Irawan

Mungkin belum ada presedennya bahwa dalam percakapan sehari-hari orang menjadikan harapan agar lawan bicaranya selalu sehat dengan intensitas seperti sekarang. Harapan agar sehat, salam sehat, dalam percakapan sekarang ini terasa begitu bermakna, menyentuh, romantis, dan syahdu. Harapan agar sehat sering diucapkan sambil tenggorokan tercekak. Harapan agar sehat diucapkan dalam intonasi seakan-akan hidup kita bisa berakhir setiap saat.

Selama pandemi, gaya hidup sehat ditengok kembali. Semua orang berlomba memasukkan segala macam zat ke dalam tubuhnya agar imunitas diri meningkat. Rimpang atau empon-empon dan segala jenis tanaman herbal naik daun. Los-los empon-empon di pasar tradisional yang bergerak dalam irama pelan karena biasanya hanya diisi kaum nini-nini, tiba-tiba menjadi riuh rancak

karena pembeli dan pemasok datang silih berganti. Lahan-lahan tidur dicangkuli untuk ditanami. Ibu-ibu rumah tangga menanam halaman belakang dan emperan rumah dengan jahe, temulawak, kunyit, dan sejenisnya.

Arus deglobalisasi, sepertinya dimulai dari perburuan terhadap zat yang bisa melawan COVID-19. Sampai saat ini belum ada hegemoni farmasi global yang bisa menyediakan solusi tuntas. Masyarakat mencari solusinya sendiri di kebun belakang rumah mereka.

Memang, di awal pandemi, solusi obat-obatan dan suplemen kesehatan sempat menjadi buruan sehingga mengalami kelangkaan. Namun, setelah itu, tak ada yang mengalahkan hangatnya jahe di malam yang dingin, maupun kunyit asem yang segar di panas yang terik. Imun meningkat dengan cara-cara nikmat.

Gaya hidup untuk mengonsumsi antioksidan makin meningkat. "Asupan antioksidan dapat menjaga imunitas tubuh kita tetap tinggi. Antioksidan bekerja di dalam tubuh kita di tingkat selular untuk membantu menyingkirkan berbagai jenis radikal bebas, mengurangi reaksi radang dan memperbaiki serta membantu memulihkan sel yang rusak. Untuk itu sangat penting mengonsumsi antioksidan saat masa *new normal* ini," papar dr. Bintang Cristo Fernando, Sp.BS, Dokter Spesialis Bedah Saraf dan Kepala IGD Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta, seperti dimuat di halodoc.com (15/06/2020).

Jahe dan rimpang lainnya adalah antioksidan lokal yang diakui kemanjurannya. Buah-buahan juga banyak yang mengandung antioksidan, mulai dari buah yang harus diimpor dan harganya mahal seperti *berry-berry-an*, sampai tomat yang mudah dan murah diperoleh dari warung-warung sekitar kita. Jadi jangan anggap remeh orang yang menyepak jahe di angkringan malam di Jogja atau orang makan pecel lele sambal tomat di pinggir jalan, karena mereka itu sedang merayakan ritual *self-healing* melalui konsumsi antioksidan dengan kearifan lokal.

Namun imunitas juga tak hanya harus dijaga dengan konsumsi zat antioksidan. Imunitas bisa turun drastis akibat terpapar pemicu stres kejiwaan. Kesaksian penyintas atau pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19 umumnya menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Semasa dalam perawatan, kondisi kesehatan akan menurun jika mereka *down* atau *stress(ed)*.

Malah pemicu turunnya imunitas dari sisi psikologis ini kadang lebih sulit dihindari. Pemicu ini ada dalam kehidupan sehari-hari yang saat ini banyak dilangsungkan di dunia maya. Media sosial dan media online menjadi dunia yang kita akrabi terlebih dalam masa pandemi ini. Sayangnya, justru dunia itulah yang sering menjadi pemicu tekanan jiwa kita.

Di dunia maya, informasi lalu lalang, opini terbang-terbang. Baik opini yang sah, maupun opini yang berintensi untuk membuat darah orang mendidih.

Dalam era penyiaran perseorangan (*personal broadcasting*) seperti saat ini, yang umumnya dilangsungkan di media sosial dan internet, tanggung jawab sosial terhadap informasi makin tipis.

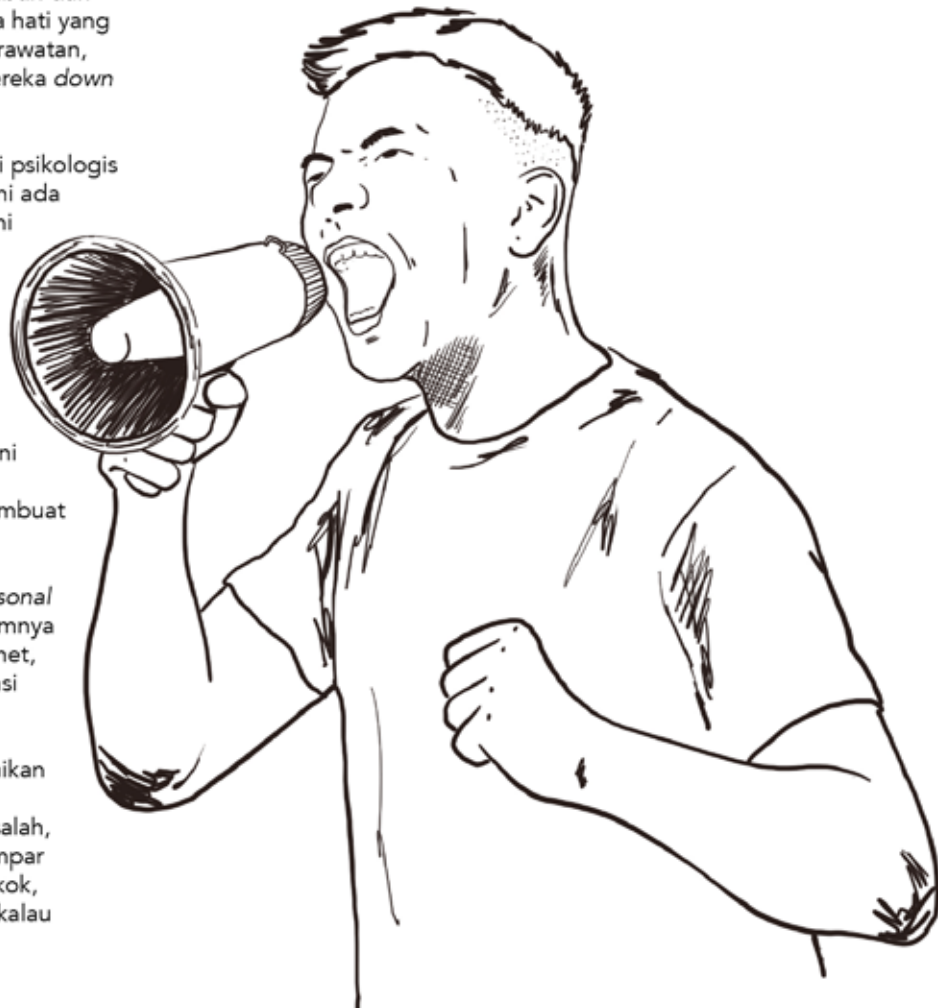
Dikiranya orang bebas untuk menyampaikan informasi yang tidak terverifikasi. Ketika kemudian terbukti bahwa informasinya salah, dan bahkan membahayakan, mereka lempar tanggung jawab begitu saja. Kalau dicokok, meweek di kantor polisi. Masih mending kalau

cuma harus menorehkan tanda tangan di atas meterai enam ribuan.

Orang Jawa sering menyebut orang yang tidak memiliki tanggung jawab sosial ini sebagai "wong edan". Wong edan ini dianggap lebih sakit dibanding ODGJ (orang dengan gangguan jiwa). Wong edan lebih destruktif karena aktif menggerogoti tatanan kemasyarakatan.

Contoh terbaru adalah mereka-mereka yang di tengah pandemi ini tega menafikan usaha-usaha keras para pejuang dalam berbagai bidang dengan mendekonstruksi narasi besar penanggulangan pandemi. Nalar dan nurani mereka buta, menyampaikan informasi yang tidak terverifikasi, atas nama semangat untuk antikonspirasi, antikeamanan, dan hanya menonjolkan kepentingan dan popularitas pribadi. Tak habis pikir kita dengan orang-orang seperti ini. Sulit untuk dipahami. Paling gampang ya ngikut orang Jawa menyebutnya sebagai "wong edan".

Sudah menjadi nasib kita, bahwa untuk meningkatkan imunitas diri, kita tidak hanya butuh antioksidan, namun juga antiwongedan.\*\*\*



# Data Pribadi Tetap Prioritas!

**R**ancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia. RUU Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia, di manapun data pribadi tersebut berada.

Pembahasan RUU PDP saat ini telah masuk tahap Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Tercatat Komisi I DPR RI telah melakukan tiga kali RDPU selama bulan Juli untuk meminta masukan atas naskah RUU PDP yang dikirim pemerintah.

“Hingga saat ini Komisi I DPR RI telah melakukan tiga kali RDPU dengan stakeholder akademisi dan asosiasi, pada tanggal 1, 6, dan 9 Juli 2020,” ungkap Kasi Perencanaan Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Tuaman Manurung di Jakarta, Kamis (30/07/2020).

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan komitmen Komisi I mengawal RUU PDP agar nantinya UU PDP dapat menjadi payung hukum yang komprehensif dalam melindungi data pribadi.

“Komisi I telah sepakat dengan Kementerian Kominfo untuk memasukan RUU PDP dalam Prolegnas 2020. Mengingat diperlukannya RUU tersebut guna mengatur strategi mengenai kejahatan penyalahgunaan data pribadi,” tandas Bobby. Anggota Komisi I DPR RI Bobby A Rizaldi mengatakan RUU PDP Indonesia akan menjadi regulasi terkait pelindungan data paling mutakhir di seluruh dunia.

Secara substantif, Komisi I menekankan pentingnya peran strategis pengendali data, baik *data controller* ataupun *data processor*. Komisi I berharap keduanya dapat melaksanakan kewajibannya dalam memperoleh persetujuan pemilik data, memberikan akses kepada pemilik data, penghentian pemrosesan data pribadi, serta memperbaharui dan memperbaiki ketidakakuratan data pribadi. Sedangkan untuk hal-hal yang belum terjawab seperti lembaga pengawas independen, Bobby mengatakan akan dilakukan pembahasan kembali untuk diputuskan kemudian.

Dalam RDPU tersebut hadir perwakilan akademisi yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edmon



## Segera Bentuk Panitia Kerja

Makarim; Nonot Harsono; Ketua Cyberlaw Center Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Sinta Dewi Rosadi; dan pakar hukum dari Unika Atmajaya, Sih Yuliana Wahyuningtyas.

Sedangkan dari asosiasi hadir Asosiasi penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) yang memberi masukan terkait data rekam medis, *Indonesian E-Commerce Association (idEA)*, *Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)*, *US-ASEAN Business Council*, serta Koalisi Advokasi PDP.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan turut menyampaikan progres pembahasan RUU PDP yang tinggal membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk memilah Daftar Inventarisir Masalah (DIM).

“RUU PDP bisa dikatakan sudah matang, tapi karena pandemi COVID-19, Komisi I harus fokus terhadap ketahanan nasional mengenai pandemi terlebih dahulu. Proses pembahasan RUU bukan proses yang singkat, tetapi kita sudah komitmen. RUU PDP menjadi satu-satunya prioritas pada tahun 2020 untuk segera bisa disahkan,” jelasnya di Jakarta, Selasa (28/07/2020)

Farhan juga memberikan catatan terkait RUU PDP mengenai lembaga yang akan melakukan tata kelola mengenai perlindungan data pribadi. “Saya harapkan nantinya perlu dibuat suatu lembaga independen yang melakukan tata kelola atas nama

publik. Saya lihat ada peluang tidak harus membuat lembaga baru, tetapi bisa saja kita integrasi lembaga yang sudah ada,” ujarnya.

Farhan pun mengusulkan penggabungan antara Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Lembaga Sensor Film, dan Dewan Pers untuk nantinya menjadi Komisi Nasional Pengelolaan dan Pelindungan Data Pribadi.

“Apabila empat lembaga tersebut digabungkan akan bisa menjadi satu lembaga yang memiliki legitimasi kuat untuk melakukan tugas tata kelola data pribadi. Lalu bagaimana dengan penegakan hukumnya? Tentu harus diserahkan kepada dua lembaga, kepolisian untuk keamanannya, dan BSSN untuk ketahanan nasionalnya,” pungkask Farhan.





## Empat Pihak Pelindung Data

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika menjelaskan pentingnya perlindungan data pribadi disadari oleh empat pihak, terutama saat memasuki ruang digital saat ini di mana data pribadi setiap pengguna dikumpulkan berbagai pihak sebagai identitas. Empat pihak tersebut adalah pemerintah, pengendali/pemroses data, pemilik data, dan penegak hukum.

Menurut Dirjen Samuel, pemerintah sebagai regulator memiliki dua fungsi utama dalam hal melindungi data pribadi warga negaranya. Fungsi pertama dengan menyediakan sebuah payung hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Sedangkan fungsi kedua, pemerintah melakukan pengawasan dalam penerapan regulasi tersebut.

Selanjutnya pihak pengendali atau pemroses data yang wajib memastikan keandalan sistem

dalam melindungi data pengguna. Selain itu, pengendali data juga harus memiliki mitigasi risiko jika terjadi serangan atau kebocoran data pada sistem yang mereka miliki.

“Berikutnya yang tidak kalah pentingnya si pemilik data itu sendiri. Mereka juga harus diberikan sosialisasi dan pemahaman. Jangan sampai regulasinya sudah ada, pengendalinya sudah mematuhi aturan, tetapi pemilik datanya dengan mudah mengumbar data pribadinya,” ungkap Dirjen Samuel.

Setelah tiga pihak tersebut, pihak terakhir yang berperan dalam perlindungan data pribadi ialah aparat penegak hukum. “Jika bicara perlindungan data pribadi maka ujungnya ialah penegakan hukumnya,” tandas Dirjen Samuel.

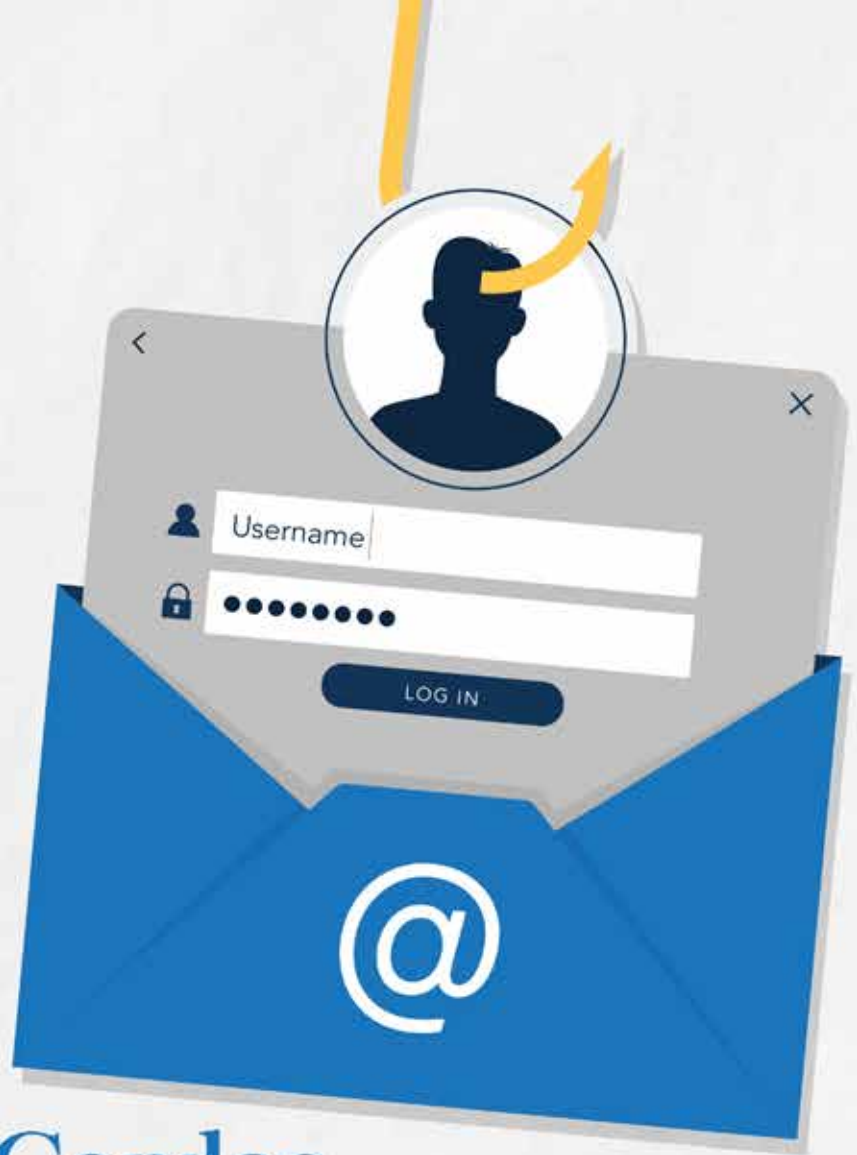
“Jadi semua terlibat dan berperan, baik pemerintah, pengendali data, pemilik data, bahkan penegak hukum. Ayo kita sama-sama berkontribusi dalam pembahasan RUU PDP nanti, kita kejar tahun ini selesai karena sebenarnya sudah *overdue*,” tutup Dirjen Samuel.

### Sumber :

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/dpr-telah-adakan-rapat-denger-pendapat-umum-terkait-ruu-pdp/>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/empat-pihak-yang-harus-melindungi-data-pribadi-di-ruang-digital/>

**Sumber Foto** :Unsplash



## KOMINFO Luncurkan Kampanye “Cerdas Bertelekomunikasi”

Malam itu seperti biasanya, Rahma sampai di rumah kontrakan yang berada di bilangan Abdul Muis, Jakarta Pusat, setelah berjibaku dengan rutinitas pekerjaan di kantornya. Tentunya, makan malam menjadi momen yang ditunggu untuk mengembalikan energi setelah beraktivitas seharian. Hal yang sudah menjadi kebiasaan Rahma, dan kebanyakan generasi digital saat ini adalah memesan makanan melalui aplikasi daring di resto favoritnya, yang sebenarnya hanya berjarak beberapa kilometer dari kontrakannya.

Dengan cekatan, jemari Rahma menari di atas layar ponselnya, memilih menu yang akan menjadi santapan malamnya. Tak berapa lama, muncul notifikasi pesan singkat dari

mitra layanan pesan antar aplikasi daring tersebut. *“Mohon ditunggu ya Kak, saya menuju resto”* ujarnya.

Sembari menunggu pesanan tiba, Rahma membereskan barang-barangnya yang masih berserakan di beberapa sudut kontrakannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Mitra aplikasi yang sedang memproses pesannya menelepon. *“Kak, maaf ban motor saya bocor. Pesanan Kakak akan diteruskan oleh teman saya ya. Untuk meneruskan pesanan Kakak silakan menekan kode yang akan saya sebutkan”*, ujarnya. Tanpa curiga, Rahma mengikuti perintah dari ujung telepon yang ternyata adalah kode untuk melakukan *call forwarding* dari nomor Rahma ke nomor seseorang.

Satu jam berlalu sejak Rahma memasukkan kode tersebut. Makan malam tak kunjung tiba. Rahma berusaha menghubungi mitra aplikasi tadi, namun hasilnya nihil. Hal yang tidak disangka Rahma terjadi, tiba-tiba sisa saldo uang elektronik dalam aplikasi daring tersebut berkurang. Setelah itu akunnya juga *logout* secara mendadak. Seketika Rahma langsung menghubungi *call center* aplikasi untuk melaporkan kejadian ini.

“Ini yang disebut sebagai OTP Fraud”, ungkap Kasubdit Ekosistem Pitalibar Kementerian Kominfo, Dany Suwardany. Kejahatan ini menasar korban dengan memanfaatkan celah pengiriman *One-Time Password* (OTP) dalam proses permintaan *password* akun di aplikasi daring.

Tidak hanya menimpa Rahma, baru-baru ini seorang pesohor tanah air, Maia Estianty juga menjadi korban kejahatan kasus OTP Fraud. Modus dari kejahatan ini yaitu pelaku meminta calon korban untuk mengaktifkan *call forwarding* ke nomor pelaku. Kemudian pelaku akan melakukan permintaan *password* akun korban melalui aplikasi daring. Secara default, OTP akan dikirimkan melalui pesan singkat SMS, namun ada juga opsi untuk mengirimkan OTP melalui voice.

“Pengiriman OTP melalui voice ini yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk mengambil alih akun korban dan menguras saldo uang elektronik yang tertanam di aplikasi itu,” ungkap Dany lebih lanjut



Kejahatan dengan memanfaatkan fitur telekomunikasi berupa *call forwarding* ternyata bukan satu-satunya modus kejahatan yang marak di tanah air saat ini. Masih hangat di ingatan kita ketika di bulan Februari lalu muncul kasus pengurasan rekening seorang tokoh media di Indonesia dengan menggunakan modus mengambil alih nomor telepon korban melalui SIM swap.

Kejahatan SIM swap yaitu pengambilalihan SIM card ponsel korban oleh pelaku, sehingga SIM card yang aktif adalah SIM card pelaku, bukan SIM card lama korban. Dengan fitur OTP yang banyak digunakan untuk proses otentikasi berbagai macam aplikasi digital saat ini (termasuk aplikasi *mobile banking*), pelaku bisa dengan leluasa mengambil alih akun-akun yang terhubung dengan nomor telepon tersebut dan menguras saldo uang korban.

Semakin maraknya kejahatan yang memanfaatkan layanan telekomunikasi di Indonesia membuat Kementerian Kominfo meluncurkan kampanye edukasi bertajuk Cerdas Bertelekomunikasi.

“Masyarakat cerdas bertelekomunikasi akan memviralkan beberapa konten agar masyarakat tidak tertipu dengan SMS penipuan, pembajakan WhatsApp dan lain-lain,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI), Ahmad M. Ramli dalam konferensi pers di Kemkominfo TV, Selasa (30 Juni 2020).

Lebih lanjut Dirjen Ramli menyampaikan, meningkatnya pemanfaatan layanan telekomunikasi perlu diimbangi dengan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan melalui transaksi daring (perbankan/uang elektronik) yang memanfaatkan fitur layanan telekomunikasi.

Dalam kampanye edukasi Cerdas Bertelekomunikasi ini, Kementerian Kominfo juga menggandeng stakeholder terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lembaga/asosiasi lainnya.

Kejahatan SIM swap yaitu pengambilalihan SIM card ponsel korban oleh pelaku, sehingga SIM card yang aktif adalah SIM card pelaku, bukan SIM card lama korban. Dengan fitur OTP yang banyak digunakan untuk proses otentikasi berbagai macam aplikasi digital saat ini (termasuk aplikasi *mobile banking*), pelaku bisa dengan leluasa mengambil alih akun-akun yang terhubung dengan nomor telepon tersebut dan menguras saldo uang korban.

Semakin maraknya kejahatan yang memanfaatkan layanan telekomunikasi di Indonesia membuat Kementerian Kominfo meluncurkan kampanye edukasi bertajuk Cerdas Bertelekomunikasi.

"Masyarakat cerdas bertelekomunikasi akan memviralkan beberapa konten agar masyarakat tidak tertipu dengan SMS penipuan, pembajakan WhatsApp dan lain-lain," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI), Ahmad M. Ramli dalam konferensi pers di Kemkominfo TV, Selasa (30 Juni 2020).

Lebih lanjut Dirjen Ramli menyampaikan, meningkatnya pemanfaatan layanan telekomunikasi perlu diimbangi dengan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan melalui transaksi daring (perbankan/uang elektronik) yang memanfaatkan fitur layanan telekomunikasi.

Dalam kampanye edukasi Cerdas Bertelekomunikasi ini, Kementerian Kominfo juga menggandeng *stakeholder* terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan lembaga/asosiasi lainnya.

Kampanye Cerdas Bertelekomunikasi menyediakan empat materi edukasi dalam bentuk video animasi dan infografis yang bisa diakses publik, yaitu (1) video animasi tentang SIM Swap, (2) video animasi tentang OTP Fraud, (3) infografis/ flyer tentang SIM Swap, dan (4) infografis/ flyer tentang OTP Fraud.

Dirjen Ramli berharap, dengan adanya konten cerdas bertelekomunikasi, bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran / *awareness* masyarakat sehingga dapat terhindar dari kejahatan yang memanfaatkan layanan telekomunikasi.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI), Ahmad M. Ramli dalam konferensi pers di Kemkominfo TV



## Edukasi Cerdas Bertelekomunikasi

### Waspada Kejahatan SIM SWAP

Kejahatan SIM SWAP adalah pengambilalihan SIM card baru pelaku, bukan lagi SIM card lama korban, biasanya digunakan oleh pelaku sebagai sarana untuk mengeksploitasi saldo bank korban.



### Langkah Menghadapi Kejahatan SIM SWAP

**01** Jika ada transaksi tidak dikenal yang mengurangi saldo bank Anda, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda. Lalu datang ke gerai bank untuk melaporkan situasi lebih lanjut.

**02** Jika dibarengi dengan tidak berfungsinya SIM card Anda secara tiba-tiba, segera hubungi pihak operator untuk untuk membatalkan tel itu.

**03** Jika ada pergantian SIM card yang tidak Anda ketahui, kemungkinan besar Anda terkena SIM SWAP Fraud. Mintalah operator untuk membuka SIM card baru yang berlabel di bagian belakang kepalanya.

Lalu ikuti prosedur pemrosesannya dengan membawa SIM card lama Anda ke gerai operator sesuai Laporan pada pihak berwenang (Pulvis, Bank Indonesia, atau Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut.

**04** **GANJIL** Setora kembali semua jenis password Anda!  
**IVOSIAKTI** Menyalurkan data pribadi, apalagi di media sosial.

### Stop Share!

Username, Password, Pin, Kode CVC/CVC2, Kartu Kredit, Terutama OTP (One Time Password) pada siapapun atau pihak yang mengada-kan instansi.

**05** **UNIKOHN** Mutein segan dengan siapa itu (tutupi semua foto profil) atau siapa yang ingin mengakses data pribadi Anda.

### Jangan Menginput!

Data pribadi Anda seperti nama lengkap, ibu kandung, alamat, no hp/ktip dan lainnya pada situs tidak jelas yang dianggap sebagai hasil phishing, yaitu situs palsu yang hanya ingin mengambil data pribadi Anda!

## Edukasi Cerdas Bertelekomunikasi

### Waspada Kejahatan Pembajakan Kode Rahasia (OTP)

Kejahatan pembajakan kode rahasia (OTP-One Time Password) adalah pengambilan Kode Rahasia (OTP) korban oleh pelaku kejahatan, sebagai sarana untuk bisa mengeksploitasi uang elektronik atau uang di m-banking korban.



### Langkah Menghadapi Kejahatan Pembajakan Kode Rahasia (OTP)

**01** Jika ada transaksi tidak dikenal yang mengurangi saldo bank Anda, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda. Lalu datang ke gerai bank untuk melaporkan situasi lebih lanjut.

**02** Jika ada transaksi tidak dikenal yang mengurangi saldo bank Anda, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda. Lalu datang ke gerai bank untuk melaporkan situasi lebih lanjut.

**03** Laporkan pada pihak berwenang (Pulvis, Bank Indonesia, atau Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan pelaporan dan penyelidikan lebih lanjut.

**04** **WASINDA** Itu ada yang menantang? Email, aplikasi chat, telepon, maupun SMS!  
**GANJIL** Setora kembali semua jenis password Anda!  
**UNIKOHN** Menyalurkan data pribadi, apalagi di media sosial.

### Stop Share!

Username, Password, Pin, Kode CVC/CVC2, Kartu Kredit, Terutama OTP (One Time Password) pada siapapun atau pihak yang mengada-kan instansi.

**05** **UNIKOHN** Mutein segan dengan siapa itu (tutupi semua foto profil) atau siapa yang ingin mengakses data pribadi Anda.

### Jangan Menginput!

Data pribadi Anda seperti nama lengkap, ibu kandung, alamat, no hp/ktip dan lainnya pada situs tidak jelas yang dianggap sebagai hasil phishing, yaitu situs palsu yang hanya ingin mengambil data pribadi Anda!



Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam tayangan video dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (23/07/2020). - (AYH)

# 1. Menkominfo : Senantiasa Produktif, Kreatif, dan Berkarya!

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong anak Indonesia untuk produktif, kreatif dan berkarya. "Saya menyampaikan kepada anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia untuk senantiasa produktif, kreatif dan berkarya. Masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kalian semua," katanya dalam video Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (23/07/2020).

Menteri Kominfo juga mengajak anak-anak Indonesia untuk bangga dan memajukan bangsa. "Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh bangsa Indonesia, bersama-sama kita memajukan Indonesia dan bangga sebagai bangsa Indonesia," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Johnny mendorong orangtua untuk mendampingi dan mengajarkan etika dalam mengakses jaringan internet. Menurutnya, menjaga data pribadi dan jejak digital merupakan salah satu yang menjadi poin penting dalam pilar digital parenting.

"Oleh karena itu, setiap orang tua harus tanggap dan cermat dalam dunia digital dan mengajari anak-anak mengenai etika dalam berinternet," tegasnya.

Menteri Kominfo mengapresiasi inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi dalam mewujudkan *video public service announcement* tentang pentingnya pengenalan transformasi digital kepada anak-anak sejak dini.

**“Kepada para orangtua, anak-anak, serta warganet Indonesia, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi memiliki digital parenting yang dikawal oleh berbagai *multi-stakeholders* yang ahli di bidangnya,”** ungkapnya

Sebagai penutup, Menteri Johnny juga berharap agar seluruh warga Indonesia dalam keadaan yang baik dan prima, sehingga bersama-sama dapat melaksanakan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19.

### Anak Terlindungi, Indonesia Maju

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 23 Juli. “Peringatan HAN merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi

seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Berbeda dengan peringatan pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan HAN tahun ini menghadapi tantangan karena adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, tema HAN tahun 2020 adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan *Tagline* #AnakIndonesiaGembiraDiRumah. “Hal itu sebagai dorongan agar pandemi COVID-19 tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan HAN tahun ini secara virtual, tanpa mengurangi makna HAN,” jelas Menteri PPPA. (hm.ys)



[https://www.kominfo.go.id/content/detail/28066/menkominfo-senantiasa-produktif-kreatif-dan-berkarya/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/28066/menkominfo-senantiasa-produktif-kreatif-dan-berkarya/0/berita_satker)



Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) meluncurkan kampanye Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan tema #KitaBelaKitaBeli di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

## 2.

### Jelang Pilkada Serentak, Kominfo Pastikan Jaga Ruang Digital dari Hoaks

Jakarta, Kominfo – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menekankan kembali upaya Pemerintah untuk menjaga ruang digital agar sehat. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak seluruh warga Indonesia waspada atas hoaks dengan selalu melakukan cek dan ricek informasi yang diterima.

"Ujiannya kapan? Pilkada dan COVID-19. Hoaks demikian pula hebatnya, hoaks itu sudah hidup sebelum, selama, dan setelah COVID-19. Karena ini terkait bagaimana merubah *mindset*, perilaku, dan cara berpikir masyarakat," jelasnya ketika menjadi pembicara dalam program Prime Talk Metro TV, Jakarta, Jumat (24/07/2020).

Menteri Kominfo menuturkan, jika menemukan judul berita yang menarik, maka pembaca diharapkan untuk membaca isinya secara keseluruhan.

"*Too good to be true*, jangan mudah percaya berita karena kemungkinan salahnya besar/belum tentu benar, dan *too bad to be true*. Keduanya sama, dicek dulu dengan baik, dan yang paling penting jangan terpengaruh dengan judul (*clickbait*) karena cenderung judulnya berbeda dari isi beritanya," urainya.





Lebih lanjut, Menteri Johnny menuturkan, Kementerian Kominfo akan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengawasi ruang digital. "Satu, komunikasinya dari sisi literasi. Yang kedua, proses *take down* dikeluarkan, dibersihkannya, dikasih informasi tentang mana hoaks dan yang bukan tapi itu persuasif," ungkapnya.

Menteri Kominfo turut menegaskan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan lembaga hukum yaitu Bareskrim Polri untuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi penyebar dan pembuat hoaks.

Jika ada yang berani mencoba bermain-main menyebarkan hoaks, apalagi dilakukan dengan sengaja, Menteri Johnny meyakini Bareskrim Polri akan bekerja secara sungguh-sungguh guna menegakkan hukum dan Kominfo mendukungnya dengan menyerahkan dokumen beserta bukti-bukti terkait. "Mengenai hoaks COVID-19 saja sudah 104 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, 17 diantaranya sudah ditahan oleh Polri," tandasnya.

### Atasi Tiga Tantangan

Pemerintah telah menyiapkan tiga upaya guna menjawab tantangan dalam melaksanakan dan menjaga sirkulasi demokrasi berjalan secara sehat. "Yang pertama Pilkada itu *at the point of no return*.

Kita harus laksanakan itu untuk kepentingan daerah juga karena mereka nanti mempunyai pemimpin yang *legitimate*," ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, langkah itu dilakukan agar daerah memiliki pemimpin yang bisa memerintah dengan kekuatan legalitas formal yang cukup, yang memungkinkan melahirkan kembali ekonomi Indonesia dari tekanan pada saat ini.

Menteri Kominfo melanjutkan, untuk tantangan kedua maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat agar soliditas dan persatuan di daerah semakin kuat. "Bangsa Indonesia adalah negara yang dikenal paling hebat menghadapi tantangan. Kesadaran tantangan itu bisa kita hadapi, kita lawan, dan kita sukses dengan cara satu rumusnya yakni partisipasi masyarakat," jelasnya.

Tantangan yang ketiga, menurut Menteri Johnny adalah bagaimana mengemas komunikasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang masif, bahasa yang dapat dipahami langsung, dan dipercaya oleh masyarakat.

"Pada saat kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, maka sirkulasi demokrasi akan bisa kita lakukan dengan baik. Tiga tantangan ini menjadi peluang Indonesia untuk melakukan soliditas nasional untuk menghadapi tantangan itu secara bersama-sama." (hm.ys)





Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) meluncurkan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan tema #KitaBelaKitaBeli di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

### 3. Substitusi Impor, Gernas BBI Ajak Masyarakat Gunakan Produk UMKM

Pemerintah kini menggalakkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Gerakan itu ditargetkan dapat menumbuhkan produktivitas di masa pandemi COVID-19, terutama mengajak masyarakat untuk menggunakan produk-produk buatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri sebagai alternatif substitusi impor.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menuturkan gagasan Gernas BBI #KitaBelaKitaBeli dilatarinya adanya kesadaran bahwa sudah waktunya Indonesia untuk melakukan substitusi impor.

"Sekarang waktunya *demand* di dalam negeri diisi oleh produksi dalam negeri sendiri, dan salah satu yang kuat serta punya daya tahan yang cukup tinggi untuk melakukan substitusi impor adalah sektor UMKM," ujarnya dalam Program Prime Talk, dari Studio 1 Metro TV, Jakarta, Jumat (17/07/2020).

Meski banyak sektor-sektor besar di industri manufaktur yang bahan bakunya berasal dari luar negeri, namun Menteri Johnny menilai UMKM mempunyai potensi yang luar biasa. "UMKM itu juga berbasis kepada produksi dan baku dalam negeri. Di satu sisi, memang tekanannya besar tapi di sisi yang lain itu ada peluang yang sangat besar," paparnya.

## Infrastruktur Jadi Tantangan

Menurut Menteri Kominfo, kementerian yang dipimpinnya tengah membantu pelaku UMKM yang terdampak begitu dalam karena COVID-19. Hal itu dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur TIK sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan percepatan transformasi digital.

Meskipun demikian, Menteri Johnny mengakui masih ada beberapa tantangan. Misalnya, belum semua daerah di Indonesia terjangkau jaringan 4G. "Tantangan yang paling besar memang salah satunya adalah penggelaran infrastruktur TIK. Kalau internet atau 4G ada, maka digitalisasi dapat berjalan dan sebagian terbesar coverag-nya di kota-kota besar sudah tersedia," urainya.

Selain itu, tantangan lainnya adalah mengajak UMKM bermigrasi dari *offline* ke *online* untuk *onboarding*. Sehingga, diharapkan semakin banyak lagi yang masuk di dalam ekonomi digital. "Dan itu merupakan kesempatan emas untuk substitusi impor," tambahnya.

## Pelaku UMKM Go Digital

Menteri Kominfo menyatakan masih ada "pekerjaan rumah" untuk mengajarkan pelaku UMKM Go Digital. Apalagi ketika pandemi COVID-19, mau tak mau akselerasi transformasi digital perlu dilakukan.

"Maka tentu persiapan untuk mengisi kebutuhan *Digital Talent* di Indonesia itu harus dilakukan secara masif. Walaupun *platform*, *marketplace*, dan pasar sudah ada, namun masih dibutuhkan pembelajaran soal digitalisasi, *marketing*, *packaging* dan lain sebagainya," paparnya.

Menurut Menteri Johnny selain infrastruktur, sumberdaya manusia juga sangat penting dikembangkan. "Untuk mendukung transformasi digital, Indonesia setidaknya hingga tahun 2035 membutuhkan 9 juta talenta digital yang berijazah SMK/Sarjana untuk bersama-sama membangun ekosistem digital," paparnya.

Kementerian Kominfo juga menyadari pentingnya memastikan produktivitas



masyarakat. Oleh karena itu, Kominfo menghadirkan 3 program yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan bidang digital secara *online*.

"Untuk menyediakan talenta digital bagi Indonesia, Kominfo memetakannya dalam tiga level program," tuturnya.

Menteri Johnny menuturkan, pada level pertama Kominfo mempunyai program yang disebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi guna menjangkau para petani, nelayan, peternak dengan tingkat pendidikan bawah yang jumlahnya sudah lebih dari 70 juta coverag-nya.

Kemudian, di tingkat menengah, melalui Digital Talent Scholarship (DTS) yang berijazah, baik ijazah SMA maupun Sarjana. Hal ini dimaksudkan untuk membekali dan melihat apa yang dibutuhkan UMKM Indonesia agar dapat bersaing. Para peserta diikutsertakan dalam berbagai pelatihan seperti *artificial intelligent (AI)*, *cloud computing*, dan *big data*.

Namun demikian, Menteri Johnny menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana mengajak UMKM yang jumlahnya mencapai 64 juta di Indonesia dan menjadi sokoguru penyumbang 60% dari GDP nasional. "(Dari total 64 juta, red.) Di antaranya ada 9,4 juta atau 14,6% dari UMKM sudah go digital," jelas Menkominfo (hm.ys)



## Lima Hari Operasi Kenormalan Baru Atasi Gangguan SFR Bandara Mopah

Sumber :

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/27682/lima-hari-operasi-kenormalan-baru-atasi-gangguan-sfr-bandara-mopah/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/27682/lima-hari-operasi-kenormalan-baru-atasi-gangguan-sfr-bandara-mopah/0/berita_satker)

Merauke, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika menangani gangguan spektrum frekuensi radio (SFR) di Bandar Udara Mopah Merauke. Dalam kegiatan yang berlangsung dari tanggal 29 Juni s.d. 3 Juli 2020 itu, Tim Balai Monitor SFR Kelas II Merauke Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo berhasil melakukan operasi penanganan gangguan komunikasi penerbangan.

“Sumber interferensi dapat dipantau dan dianalisa, yaitu berasal dari perangkat pengguna lain yang sewaktu-waktu melakukan pancaran. Demi mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi udara di Kabupaten Merauke dan sekitarnya,” ujar Kepala Balmon Merauke Simson Liha, di Merauke, Papua, Selasa (07/07/2020).

Walaupun Provinsi Papua dalam masa Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), Balmon Merauke tetap melaksanakan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dengan mengedepankan Protokol Kesehatan.

“Mereka tetap menjaga jarak, memakai masker, pelindung wajah dan banyak-banyak mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*,” kata Simson Liha.

Balmon Merauke berkomitmen mengawal penggunaan frekuensi radio. “Terutama yang terkait dengan keselamatan jiwa, seperti penerbangan, maritim dan marabahaya,” kata Kepala Balmon Merauke.

Peristiwa bermula setelah operasional penerbangan penumpang mengalami penutupan sejak 26 Maret 2020, sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Bandara Mopah Merauke kembali dibuka pada 26 Juni 2020.

Berdasarkan laporan Perum LPPNPI (AirNav) Merauke Nomor: 216/G/33/TEK.05.01/LPPNPI/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020, ditemukan adanya gangguan komunikasi radio Dinas Penerbangan *ground to air* yang dioperasikan AirNav Merauke.

“Ada interferensi. Hal itu menyulitkan komunikasi antara petugas dan pilot, baik yang hendak mendarat maupun yang akan lepas landas dari Bandara Mopah Merauke,” ujar *General Manager* AirNav Cabang Merauke Kiki Adrian.

Kiki Adrian menyampaikan gangguan terjadi pada frekuensi primer yang menyebabkan pilot tidak dapat berkomunikasi dengan petugas AirNav. “Operasional selama terjadinya interferensi sempat menggunakan frekuensi sekunder,” ungkapnya.



## Buka UNAR, Bupati Lotim: Manfaatkan Frekuensi dengan Bijak

Sumber:

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/27815/buka-unar-bupati-lotim-manfaatkan-frekuensi-dengan-bijak/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/27815/buka-unar-bupati-lotim-manfaatkan-frekuensi-dengan-bijak/0/berita_satker)

Lombok Timur, Kominfo – Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy membuka Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Nonreguler Periode I di SMK Negeri 1 Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu (12/07/2020).

Bupati Sukiman berharap para pegiat radio amatir di wilayahnya memanfaatkan frekuensi dengan bijak dan mematuhi aturan yang berlaku. "Selamat mengikuti ujian. Saya harap semuanya lulus, sehingga legalitasnya dapat, penggunaannya juga sesuai aturan," katanya.

UNAR di Lombok Timur sempat tertunda hingga dua kali dengan penjadwalan ulang akibat Pandemi Covid-19. Menurut Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas II Mataram I Komang Sudiarta, Balmon Mataram menerapkan Protokol Kesehatan dalam penyelenggaraan UNAR berbasis komputer (*Computer Assisted Test-CAT*).

"Ujian yang diikuti 125 peserta Tingkat Siaga itu, dibagi menjadi dua sesi pada empat ruangan laboratorium komputer. Sesi pertama dimulai pukul 08.00 sampai 12.00 WITA, sedangkan sesi kedua pada 13.00 sampai 17.00 WITA. Masing-masing sesi hanya diikuti 16 peserta, separuh dari kapasitas ruangan," jelasnya.

Menurut Komang Sudiarta, seluruh petugas dan peserta diukur suhu tubuhnya saat di pintu masuk ruangan. Mereka diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*. "Lalu mereka juga diberikan sarung tangan. Selain itu, para peserta diminta mengunduh Aplikasi PeduliLindungi," tuturnya.



Rangkaian kegiatan UNAR di masa kenormalan baru (*new normal*) ini berjalan lancar. Dari 125 peserta yang mendaftar, hadir mengikuti ujian 95 peserta. Hasilnya, 83 peserta dinyatakan lulus. Sedangkan 42 orang sisanya, termasuk peserta yang tidak hadir, dinyatakan tidak lulus.

Pada kegiatan ini, Balmon Mataram menyampaikan tata tertib dalam bentuk audio visual yang diputar pada masing-masing ruang ujian untuk memudahkan beberapa peserta yang buta huruf. Pada saat ujian berlangsung, peserta yang buta huruf ini didampingi panitia untuk dibacakan pertanyaannya.

Kepala Balmon Kelas II Mataram Sudiarta menegaskan kembali penggunaan frekuensi radio tidak boleh sembarangan. Pasalnya, penggunaan seperti itu dapat menyebabkan gangguan pengguna lain. "Diperlukan peran organisasi amatir radio untuk melakukan pembinaan kepada anggotanya. Saat ini ada 1.439 Izin Amatir Radio di wilayah Nusa Tenggara Barat yang terdata dalam sistem kami.

Namun, 594 diantaranya masih belum menjadi anggota organisasi. Mohon nanti Bapak/Ibu yang mengikuti ujian, setelah izinnya terbit, segera diurus keanggotaannya," imbau Sudiarta.

Turut hadir pada kegiatan itu, Asisten 1 Setda Lombok Timur, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Timur, Ketua Orda ORARI Nusa Tenggara Barat, dan Ketua Orlok ORARI Lombok Timur.



## Menjaga Infrastruktur Telekomunikasi di Kawasan Perbatasan

Sumber :

[https://kominfo.go.id/content/detail/27737/menjaga-infrastruktur-telekomunikasi-di-kawasan-perbatasan/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/content/detail/27737/menjaga-infrastruktur-telekomunikasi-di-kawasan-perbatasan/0/berita_satker)



Batam, Kominfo – Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar inspeksi untuk memeriksa kondisi dan fungsi stasiun monitoring spektrum frekuensi radio Transportable Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

“Tujuan kegiatan untuk mengecek kondisi dan memastikan perangkat *monitoring transportable* beserta penunjangnya di site Natuna berfungsi dengan baik, guna menunjang tugas pemantauan pendudukan (*occupancy*) spektrum frekuensi radio,” kata Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Batam, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Abdul Salam di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (09/07/2020).

Menurut Abdul Salam, kegiatan juga ditujukan untuk perawatan dan perbaikan perangkat, serta melaporkan hasilnya ke pusat jika terdapat kerusakan yang bersifat berat (*major problem*).

“Perairan dan kepulauan Natuna harus dijaga dari infiltrasi atau pendudukan pihak asing. Semua potensi yang ada di sana harus dikawal dan lindungi, termasuk infrastruktur telekomunikasi agar selalu berfungsi dengan baik,” ungkapnya.

Kepala Balmon Kelas II Batam menyatakan hasil inspeksi menunjukkan secara umum perangkat utama dan kesisteman masih berfungsi dengan baik. “Namun, ada perangkat penunjang dari SMFR (*Transportable*) yang mengalami rusak ringan. Di antaranya, tidak bisa dilakukan *remote desktop* ke PC FMU untuk tes fungsi perangkat

dan CCTV agar berfungsi sebagaimana mestinya. Tim melakukan perbaikan dan penggantian *tools*, seperti *adaptor* yang rusak,” jelasnya.

Tim inspeksi juga melakukan *restart protection board* dan perbaikan fungsi-fungsi lainnya, agar perangkat SMFR Transportable dan CCTV saat memonitor kepadatan penggunaan frekuensi radio di site Natuna dapat berfungsi kembali utuh dan normal.

“Balmon Batam, satu dari 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, melakukan giat inspeksi dari tanggal 7 hingga 9 Juli 2020. Daerah yang berada di utara Indonesia ini merupakan salah satu wilayah kerja Balmon Batam di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki dua kota dan lima kabupaten,” jelas Abdul Salam.

Natuna sangat strategis bagi Indonesia. Secara geografis, perairan dan kepulauan Natuna menjadi batas terluar penentu kedaulatan NKRI dan perlintasan rute niaga internasional. Keberadaan wilayah yang berjuluk Laut Sakti Rantau Bertuah itu, menyimpan kekayaan alam cukup besar. Selain hasil lautnya, sekitar Natuna pun kaya akan gas yang dapat dimanfaatkan bagi pasokan energi dalam dan luar negeri.

# Catat, Ini Fokus Pengembangan 5G

Media: [bisnis.com](https://bisnis.com) | Reporter: Akbar Evandio

**“Pembangunan jaringan 5G akan tetap dilakukan operator telekomunikasi, tetapi saat ini Kominfo terus mengkaji terkait persiapan tersebut dengan operator.”**

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan daerah kawasan industri menjadi titik fokus pengembangan teknologi jaringan internet generasi kelima (5G).

Pasalnya, kawasan industri dinilai merupakan area yang paling urgensi dalam penggunaan Internet untuk Segala (IoT).

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail menjelaskan bahwa daerah tersebut membutuhkan jaringan setingkat 5G dalam menunjang produksi dari industri manufaktur yang menggunakan teknologi IoT.

“Membangun 5G itu prioritas [kami], dan [kami] akan membangun di daerah sana [kawasan industri] dulu, karena daerah [di sana] yang memang secara teknologi sangat membutuhkan jaringan model 5G. Kawasan pabrik atau manufaktur ini seperti daerah seperti Cikarang, Cilegon, dan pusat pabrik dan industri manufaktur 4.0 lainnya,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (29/7/2020).

Dia menjelaskan bahwa pembangunan jaringan 5G akan tetap dilakukan operator telekomunikasi, tetapi saat ini Kominfo terus mengkaji terkait persiapan tersebut dengan operator.

“Perlu digaris bawahi bukan kementerian yang membangun, tetap operator. Namun, belum bisa [dibangun] saat ini, karena tantangannya [masih] masalah spektrum frekuensi yang masih kami kaji dan persiapan bersama operator,” tuturnya.

Sebelumnya, melalui agenda IoT Device Makers Creation 2020 for Resilience in The Face of Pandemics, Ismail menjabarkan bahwa perlu anggaran cukup besar untuk mengembangkan infrastruktur digital tersebut.

“[5G] Ini saya rasa bisa mendukung Internet of Things (IoT) di kawasan industri,” tuturnya.

Menurutnya, tingkat keterlambatan pengiriman data pada 5G lebih rendah dibanding jaringan internet generasi sebelumnya. Ismail pun berpendapat bahwa teknologi tersebut sangat mendukung penggunaan IoT hingga kecerdasan buatan.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah bersedia menjembatani startup IoT dengan para pemangku kepentingan dan membantu dalam kebutuhan penyediaan alat penunjang, sehingga Kominfo dan startup dapat bekerja sama secara teknis dan lebih dekat dengan pasar.

“Kami bersedia untuk ketuk pintu, mau ke kementerian mana, BUMN [badan usaha milik negara] mana, kami bersedia membantu makers IOT [startup IoT]. Ayo kita jalan bareng, membuka pintu bagi makers, terutama untuk memberikan solusi bagi UMKM,” ujarnya.

Sumber: <https://teknologi.bisnis.com/read/20200729/101/1272859/catat-ini-fokus-pengembangan-5g>

# Kominfo Optimistis Indonesia akan Punya 3 Unicorn Baru

Media: medcom.id | Reporter: Lufthi Anggraeni

Jakarta: Pandemi Covid-19 memicu pelemahan ekonomi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun hal ini tidak menyurutkan optimisme pemerintah, diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait kemunculan startup unicorn baru dari Tanah Air.

"(Target unicorn baru) masih bisa tercapai. Kami optimis ekonomi bergerak lagi dan kita semua berkembang. Digital adalah solusi yang tepat dalam memasuki pembangunan ekonomi berikutnya," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A Pangerapan.

Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan Indonesia akan ketambahan tiga unicorn baru hingga tahun 2024 mendatang, dan ekonomi digital menjadi tumpuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Semuel juga menilai unicorn baru Indonesia ini berpeluang muncul dari sektor keuangan, pendidikan dan pertanian. Tidak hanya soal unicorn, Semuel juga menyebut saat ini Indonesia telah memiliki startup dengan valuasi unicorn meski pemerintah masih enggan mengungkapkannya.

Sementara itu, hasil riset Katadata selama bulan Mei hingga Juni 2020 kepada 139 startup menunjukkan bahwa sebanyak 48,9 persen startup masih mampu bertahan selama hingga satu tahun setelah pandemi berlangsung, dengan asumsi mulai bulan Maret 2020.

Dan 20,9 persen responden riset ini mengaku perusahaan yang mereka rintis ini akan mampu bertahan selama enam hingga 12 bulan setelah pandemi. Sedangkan sebanyak 20,1 persen menjawab hanya mampu bertahan selama tiga hingga enam bulan, dan 10,1 persen hanya selama kurang dari tiga bulan.

Kemampuan startup dalam bertahan di tengah pandemi disebut riset Katadata didorong oleh sejumlah faktor, termasuk penemuan model bisnis baru yang mampu membantunya bertahan, serta ketersediaan cadangan besar sebelum pandemi.

Dan selama bulan Mei 2020, riset Katadata menyebut bahwa sebanyak 33 persen startup mengaku dalam kondisi baik dan sangat baik, menurun jika dibandingkan dengan riset sebelumnya pada akhir tahun 2019, sebesar 74,8 persen.

Sedangkan pada bulan Mei 2020, sebanyak 24,5 persen startup mengaku dalam kondisi biasa saja, meningkat dari riset sebelumnya sebesar 21,6 persen. Untuk startup yang mengaku dalam kondisi buruk selama bulan Mei 2020 sebanyak 42,5 persen, meningkat dari riset sebelumnya berjumlah 3,6 persen. (MMI)

Sumber: <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/ObzM-wjIN-kominfo-optimistis-indonesia-akan-punya-3-unicorn-baru>

## SEMINAR DARING

# MENDORONG AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

Sudah hampir empat bulan semenjak Indonesia berjibaku melawan Pandemi COVID-19. Selama itu juga, Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi masyarakat baik bidang sosial, ekonomi, dan tentunya bidang kesehatan. Selama itu pula, Pemerintah Presiden Jokowi melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi pagebluk COVID-19 di tanah air. Program tersebut mulai dari *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan program-program bantuan bagi masyarakat seperti Kartu PraKerja, Kartu Sembako, bantuan sosial dan program bantuan lainnya. Saat ini, Indonesia sudah akan memulai untuk menjalani proses Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). AKB merupakan program agar masyarakat bisa tetap produktif serta aman dari COVID19 dengan menjalankan protokol-protokol yang telah ditentukan.

Biro Humas Kementerian Kominfo dalam upaya untuk bisa tetap produktif, menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait program dan kebijakan kementerian terus berupaya untuk menjalankan program sosialisasi ke publik. Salah satu yang menjadi program kementerian di era kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yaitu Mendorong Akselerasi Transformasi Digital.

Program ini merupakan program yang bersinggungan langsung serta berdampak luas terhadap publik, terutama jika dikaitkan dengan bagaimana masyarakat bisa tetap produktif di masa pandemi COVID19. Ketika COVID19 mulai secara resmi hadir di Indonesia pada Bulan Maret 2020, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengambil peran signifikan dalam upaya untuk tetap menjaga produktifitas masyarakat. Rapat, seminar dan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, di era AKB ini beralih ke rapat virtual, seminar daring serta media-media lain yang memanfaatkan TIK.

Sejalan dengan hal tersebut, Biro Humas menyelenggarakan seminar dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya untuk membahas mengenai kesiapan sektor TIK di Indonesia dalam proses akselerasi transformasi digital. Tentunya, sudut pandang yang akan disajikan dalam seminar daring ini yaitu dari sisi kesiapan pemerintah dimana Kementerian Kominfo menjadi *leading sector* dalam menyiapkan aspek-aspek yang diperlukan agar transformasi digital berjalan sesuai rencana. Untuk tetap menjaga agar tetap aman dari COVID19, seminar ini dilakukan secara daring dengan format Seminar Daring. Peserta bergabung mengikuti seminar dengan perantara media digital dari lokasi masing-masing di seluruh wilayah di Indonesia.







Seminar daring seri I dilaksanakan pada hari Senin, 20 Juli 2020 pukul 13.30 – 15.30 WIB yang dilaksanakan secara *live* melalui aplikasi *meeting virtual* dan di *broadcast* di akun YouTube Kemenkominfo dengan tautan berikut [komin fo/WebinarD1](https://www.youtube.com/watch?v=WebinarD1) . Seminar ini dihadiri langsung oleh Menkominfo, Johnny G. Plate. Menkominfo pada kesempatan ini menyampaikan *keynote speech* mengenai langkah-langkah Kementerian Kominfo dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia.



Seminar daring seri kedua diadakan pada hari Selasa, 21 Juli 2020 pada pukul 13.30 – 15.30. Narasumber menyajikan paparan tentang kesiapan masyarakat Indonesia menyongsong era digital, dan kebijakan-kebijakan lain yang mendorong akselerasi transformasi digital untuk dapat menjadi *talking point* demi membantu terciptanya transformasi digital di Indonesia serta dukungan dari platform digital seperti Gojek dan Tokopedia yang bisa mendorong dan membantu masyarakat dalam melakukan akselerasi transformasi digital. Seminar serie II ini tetap dipandu oleh Plt Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu.









# Kisah Lensa

Orang Badui yang juga dikenal sebagai Orang Kanekes merupakan salah satu suku di Indonesia yang dikenal dengan adat istiadatnya yang masih kental. Wilayah suku Badui sendiri telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Lebak sejak tahun 1990.

Suku asli dari Provinsi Banten ini memiliki populasi sekitar 26.000 jiwa yang terdiri dari Badui Dalam dan Badui Luar. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani ataupun pengrajin. Hal utama yang membedakan kedua suku ini adalah cara menjalankan aturan adat. Badui Dalam lebih teguh dalam menjalankan adatnya, sedangkan Badui Luar perlahan mulai menerima perubahan jaman.



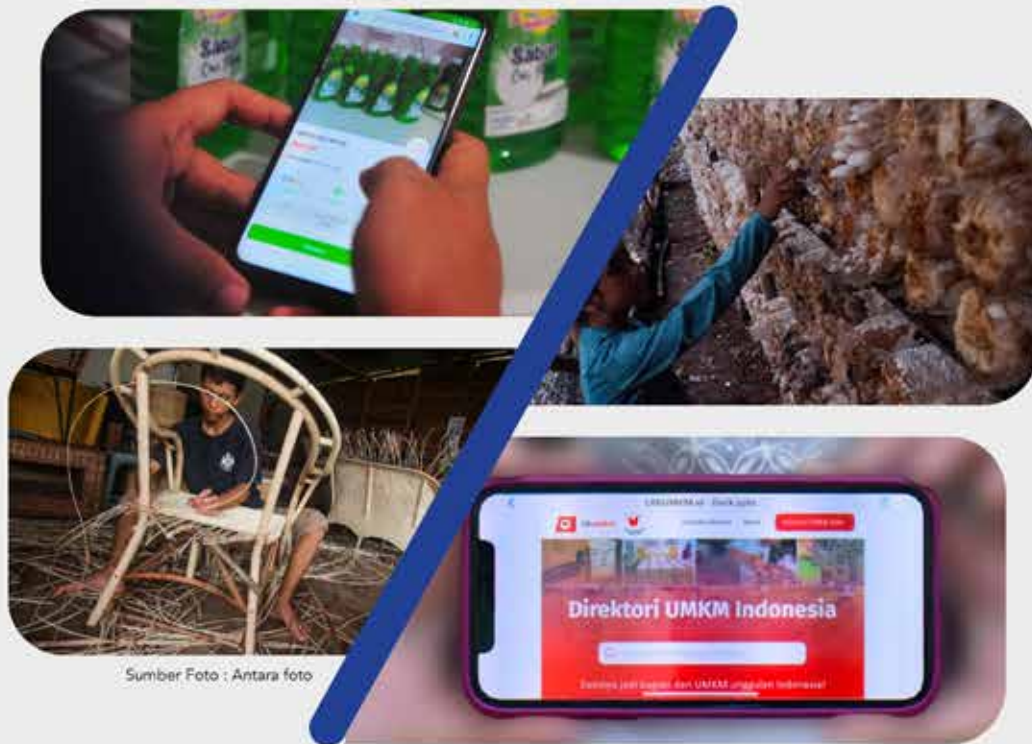
Walau mulai menerima perubahan, orang Badui Luar tetap menganut prinsip “Gunung Ulah Dilebur, Lebak Ulah dirusak”, yang berarti gunung jangan dihancurkan dan lembah sebagai penampung air jangan dirusak. Badui Luar tetap menolak pendidikan formal bagi anak-anak mereka, pembangunan fasilitas infrastruktur, dan masuknya aliran listrik ke dalam wilayah Badui Luar hingga saat ini masih tidak diperbolehkan.





Ketiadaan aliran listrik di wilayah Badui Luar bukan penghalang bagi teknologi digital untuk masuk dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan mulai maraknya kepemilikan telepon pintar atau *smartphone* di sebagian warga Badui Luar untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan dunia luar. Walau harus berjalan setidaknya sekitar satu jam ke wilayah Ciboleger untuk sekedar mengisi daya baterai dan mendapatkan sinyal telepon.



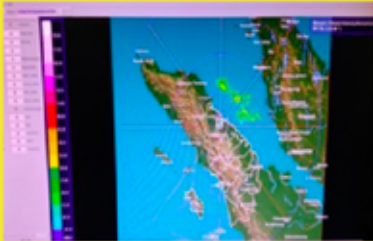


Sumber Foto : Antara foto

## Portal lakumkm.id, Integrasi Akses UMKM ke Platform Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenalkan portal yang bisa membantu pelaku UMKM, terutama dalam binaan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Kominfo. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel A. Pangerapan menyatakan portal tersebut nantinya dirancang menjadi suatu aplikasi. "Lewat portal lakumkm.id, UMKM binaan itu bisa memiliki tools dan mempunyai sistem inventory," tuturnya dalam Konferensi Pers Daring "Launching Gerakan Bangga Buatan Indonesia" di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (16/07/2020).

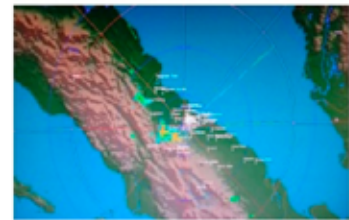
"Pelaku UMKM pasti ingin jualan di berbagai platform. Jadi, dalam satu aplikasi ini bisa langsung berjualan di berbagai platform. Apabila banyak orderan, kita enggak keluar dari satu platform ke platform lainnya lagi. Hanya membuka channel, mem-back-tools," ungkapnya. Menurut Dirjen Semuel, aplikasi itu juga dapat menjadi salah satu upaya membenahi basis data UMKM yang dibina oleh pemerintah.



## Tertibkan Ratusan Perangkat Nirkabel Penyebab Gangguan Radar BMKG

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan penertiban 900 perangkat nirkabel yang menyebabkan gangguan atau interferensi pada perangkat radio detection and ranging (Radar) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, Syamsul Huda, mengatakan pihaknya menindaklanjuti aduan Balai Besar Wilayah I Medan BMKG mengenai adanya gangguan spektrum frekuensi radio pada pita 5.8 GHz.

Keberadaan Radar BMKG dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi cuaca dan potensi intensitas curah hujan di suatu wilayah, termasuk untuk kepentingan navigasi penerbangan. "Data yang dihasilkan radar BMKG dapat terganggu bila ada pancaran frekuensi lain/interferensi pada rentang 5600 – 5650 MHz, akibatnya radar tidak dapat membaca *product reflectivity* adanya partikel air di udara secara tepat. Radar dapat bekerja dengan jangkauan terjauh sampai 240 kilometer," jelas Syamsul Huda.



S

## Hingga 2024, Kominfo Targetkan Meliterasi 50 Juta SDM

D

Guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) bidang digital, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Pangerapan mengatakan Kementerian Kominfo memiliki tiga program terkait literasi digital, baik untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat umum. Program-program yang disiapkan, ditargetkan akan meliterasi 50 juta SDM dalam empat tahun ke depan agar lebih melek digital.

M

"Kenapa kok cuman 50 juta? Kita harapkan dari 50 juta ini orang-orang yang sudah berliterasi akan meliterasi teman-teman atau kerabat terdekatnya agar mereka juga siap memasuki era digital," tutur Dirjen Aptika dalam Webinar yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta, Kamis (16/07/2020).



Sumber Foto : Josue Ladoo | Unsplash

## Kominfo Ajak Pranata Humas Putus Mata Rantai Penyebaran COVID-19

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong Pejabat Fungsional Pranata Humas mengambil peran dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 di Indonesia. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Selamattha Sembiring mengatakan, setiap Pejabat Pranata Humas dibebankan tugas untuk mampu mensosialisasikan dan mendiseminasikan informasi mengenai penanganan pandemi COVID-19. "Termasuk seluruh protokol kesehatan kepada masyarakat hingga lapisan bawah (*grass root*)," jelasnya Selasa (14/7/2020).

Menurut Direktur Sembiring, saat ini Pejabat Pranata Humas memiliki tugas menjadi pelaksana *Government Public Relations* (GPR). "Kalau dulu tugasnya Pranata Humas hanya menyampaikan hasil-hasil apa yang dikerjakan oleh organisasi pemerintah tempat dia berada untuk memberikan citra positif, sekarang Pranata Humas, mengemban tanggung jawab untuk pelaksanaan GPR secara umum," ujarnya.

## Digital Melayani, Pemerintah Kembangkan Platform Digital Berbasis Cloud

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono mengatakan kini layanan pemerintah sudah dapat berlangsung melalui *cloud*. "Memang tidak bisa dihindari, dari sekitar 216 sekolah yang ada, dari 83.500-an desa dan kota, *platform* digital itu harus digunakan di lingkungan pemerintah," tuturnya.

Menurut Bambang, pemerintah mendorong kementerian dan lembaga untuk menggunakan sebuah *platform* standar yang saat ini masih secara bertahap disusun. "Yang pertama, kita membagi *platform-platform* tersebut dalam sektor-sektor seperti misalnya untuk pendidikan dan mengarah pada kelas-kelas online," jelasnya. Kemudian dari sisi perizinan, pemerintah sudah melibatkan satu *platform* menggunakan sistem *single platform* guna mempermudah/menyederhanakan proses izin yang ditargetkan pada akhir tahun 2020 ini sudah diterapkan oleh 548 Pemerintah Daerah.



## BAKTI Kominfo Fasilitasi Situs dan Aplikasi JFT Penerjemah



Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo memfasilitasi penyediaan situs web dan aplikasi E-Jabatan Fungsional Penerjemah (E-JFP). Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, tantangan bangsa ini ke depan akan semakin kompleks, persaingan kompetisi antar negara dan antar individu semakin ketat, serta akan banyak sektor di masa mendatang yang membutuhkan peran penerjemah, begitupun sebaliknya.

Sementara itu, Direktur Utama BAKTI Anang Latif mengatakan, kerja sama antara BAKTI Kominfo dengan Setkab bertujuan untuk pemanfaatan sistem informasi, aplikasi dan situs guna mendukung pengelolaan manajemen sistem informasi jabatan fungsional penerjemah dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi. "Penerjemah memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi Pemerintah dalam upaya menjalin peluang kerja sama dengan mitra di luar negeri, baik instansi pemerintah maupun investor," ungkapnya.

## Dirjen IKP Bicara Strategi Komunikasi Upaya Penurunan Stunting

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Widodo Muktiyo mengatakan, strategi komunikasi merupakan langkah penting pemerintah dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Menurutnya masyarakat perlu mengenal stunting, di mana kekurangan gizi anak-anak pada stunting dibatasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), untuk menjadi perhatian bersama agar tidak mengakibatkan kondisi gagal tumbuh.

"Pesan yang nanti akan kita olah bersama-sama adalah bagaimana kita di Indonesia ini mengupayakan adanya kesadaran baru buat ibu-ibu muda, pasangan muda di tengah kondisi adaptasi kebiasaan baru ini tetap memperhatikan stunting," tutur Dirjen IKP dalam Webinar Upaya Pemerintah dalam Mengakselerasi Penurunan Stunting di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dari Jakarta, Kamis (16/07/2020).



Sumber Foto: Unsplash



## Meski Pandemi Tetap Tingkatkan Tertib Frekuensi

Sebanyak 106 anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) mengikuti Ujian Amatir Negara (UNAR) yang digelar Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Dalam pembukaan, Kepala Balmon SFR Kelas I Yogyakarta Heriyanto mengapresiasi kontribusi ORARI dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam berbagai situasi yang membutuhkan dukungan komunikasi dan informasi.

“Anggota ORARI dalam penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan frekuensi yang telah dialokasikan khusus untuk kegiatan Amatir Radio (*Band Plan*). Daya pancar dan perangkat radio yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” jelasnya mengenai batasan penggunaan frekuensi radio.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelesaikan gangguan atau interferensi frekuensi radio microwave link 8118.32 MHz, Site 172525\_Sekapuk ke 172481\_Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Menurut Kepala Balmon Kelas II Banjarmasin Mujiyo, penanganan interferensi dilakukan dengan audit perangkat atau *hardware*. “Berdasarkan monitor dan hasil ukur *spectrum analyzer*, tidak termonitor adanya spektrum frekuensi yang mengganggu. Selain itu, setelah *setting hardware*, site yang tadinya terganggu mengalami perbaikan performa RSL menjadi normal,” jelasnya.

## Balmon Banjarmasin Tangani Interferensi dengan Audit Perangkat



## Gandeng Ekosistem, Kominfo Gelar Literasi Digital di 12 Kota

Pemerintah terus mendorong upaya edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi “Penyusunan regulasi terkait perlindungan data pribadi tentu harus simultan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi,” ujar Dirjen Aptika, Samuel Pangerapan dalam acara Literasi Digital di Masa Pandemi, Rabu (8/7/2020).

Dilansir dari laman privasi.id, kegiatan ini hadir di 12 kota yaitu: Cirebon, Padang, Pekalongan, Palembang, Denpasar, Mataram, Manado, Ambon, Jayapura, Pasuruan, Banjarmasin, dan Mamuju. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Dirjen Samuel berharap semakin banyak kerjasama dan kolaborasi komunitas, akademisi, pelaku bisnis, media sosial, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.

## Menkominfo: Penyiaran Perlu Dijaga untuk Kepentingan Publik



Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya mempercepat penerapan siaran televisi berbasis digital. Menteri Kominfo Johnny G. Plate meyakini Migrasi ke TV Digital dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi industri *broadcasting* namun juga bagi masyarakat.

“Percepatan migrasi ini ditujukan untuk menjaga koeksistensi dari industri itu, menjaga kepentingan konsumennya, menjaga juga kepentingan publik dari sisi pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih lebih baik,” tuturnya dalam Program Newscast CNN TV, Jakarta, Senin (20/07/2020).

Menurut Menteri Johnny, proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai Analog Switch-Off atau ASO ini harus ditempuh dan disegerakan, demi menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.



# Top 10 Hoaks

Juli 2020

## 1 Masker Wajah Sebabkan Infeksi Jamur pada Paru-paru

Telah beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwa memakai masker wajah dapat menyebabkan infeksi jamur pada paru-paru. Faktanya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengenakan masker wajah untuk waktu yang lama aman selama pemakai secara teratur mengganti atau mencuci masker mereka jika basah atau kotor.

## 2 Kabupaten Pekalongan Zona Hitam COVID-19

Beredar pesan berantai melalui WhatsApp bahwa Kabupaten Pekalongan saat ini menjadi zona hitam COVID-19. Narasi pesan berisi tentang suami dari salah satu pejabat daerah Kabupaten Pekalongan yang dinyatakan terpapar COVID-19 setelah melakukan kontak fisik dengan guru-guru di sebuah sekolah.

Faktanya, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menepis kabar tersebut dan memastikan pesan itu hoaks. Ia menjelaskan bahwa Pekalongan berstatus zona kuning dengan resiko rendah. Bahkan hasil monitoring menunjukkan banyak desa yang masuk dalam kategori zona hijau dengan 0 kasus COVID-19. Saat ini di Kabupaten Pekalongan total ada 29 kasus positif COVID-19, dengan rincian 12 pasien dirawat, 12 sembuh, 3 isolasi mandiri, dan 2 meninggal.

Saat ini status pandemi 19. Dikab.pkl menjadi zona hitam. Karena Bpk imron suami dari ibu hj.hindun melakukan kunjungan kerja di MAS SIMPANG KULON dan melakukan kontak fisik dgn seluruh pengawas pendidikan kab.pkl dan perawatnya juga melakukan kontak fisik kod sebagian guru set. dan guru MAS SIMKUL Di isolasi mandiri selama 14 hari. Dan seluruh madrasah SE.kab.pkl haruskan untuk mensterilkan kasahnyu di disinfektan.

Dengan adanya perubahan zona pandemi yg begitu drastis

Itu info terkini

07:13

## 3 Soda Kue Dapat Tingkatkan Stamina

Beredar informasi di media sosial bahwa mengonsumsi soda kue dapat meningkatkan daya tahan fisik. Informasi tersebut menjelaskan cara konsumsi soda kue, yaitu mencampurkannya dengan 1 gelas air lalu diminum 1 jam sebelum berolahraga.

Setelah ditelusuri, klaim tersebut salah. Dikutip dari [factcheck.afp.com](http://factcheck.afp.com), Tirayut Vilaivan, seorang profesor kimia di Universitas Chulalongkorn Thailand mengatakan bahwa mengonsumsi soda kue tidak dapat membuat seseorang berolahraga lebih lama. Sebaliknya, itu dapat mengacaukan sistem pencernaan. Soda kue atau natrium bikarbonat memiliki unsur natrium yang dapat berbahaya bagi ginjal manusia.

## Virus Corona Bisa Masuk Melalui Handphone 5

Beredar di media sosial foto Presiden Joko Widodo yang diambil dari situs [suara.com](http://suara.com) saat memberikan keterangan resmi penanganan COVID-19 di Istana Bogor, disertai narasi "Jokowi, Virus Corona bisa Masuk melalui Hp Jadi Jangan kelamaan memegang hp."

Faktanya, foto tersebut disunting dari foto asli yang diunggah oleh fotografer Antara Sigid Kurniawan pada 15 Maret 2020. Dilansir dari [medcom.id](http://medcom.id), Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers tersebut meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran Virus Corona (COVID-19)



## 4 Kalung Eucalyptus Jimat Virus Corona

Beredar informasi di media sosial yang berisi klaim bahwa kalung eucalyptus sebagai jimat antivirus Corona yang dibuat oleh Menteri Pertanian RI. Dilansir dari laman situs [Liputan6.com](http://Liputan6.com), kabar ini tergolong disinformasi. Kementerian Pertanian menyebut kalung eucalyptus bukan jimat antivirus Corona, namun berpotensi membunuh Virus. Dalam pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk eucalyptus pun tidak diklaim sebagai antivirus Sars-CoV-2 penyebab COVID-19.

## Israel Ubah Masjid Bersejarah Menjadi Bar 6

Beredar sebuah foto di media sosial Facebook disertai narasi yang mengklaim Israel mengubah bangunan bersejarah Masjid Al Amar menjadi sebuah bar atau aula pesta pernikahan sejak 2019 lalu. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Sebenarnya foto tersebut memperlihatkan pria muslim melaksanakan salat di tempat parkir di kota Jaffa, Israel, pada tanggal 20 Mei 2020, saat masjid ditutup karena pandemi COVID-19.

## Ritual Pemuja Setan dari Sekte di Kampus ITENAS



Beredar kabar di media sosial Twitter tentang adanya kegiatan pemujaan setan di salah satu kampus swasta di Kota Bandung, disertai foto sekumpulan orang-orang menggunakan jubah hitam, dengan keterangan bahwa kegiatan tersebut adalah sekte pemuja setan.

Setelah ditelusuri, komentar dan unggahan tersebut adalah hoaks. Kepala Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung dalam surat klarifikasinya membantah informasi tersebut. Foto tersebut merupakan kegiatan mahasiswa 'Jumat Seram' (Jumat Senang Ramai-Ramai) yang diadakan pada bulan November 2019, dan tidak ada hubungannya dengan Ritual atau Sekte Pemujaan Setan.

## 8 Guru Honorer Diminta Maklumi Gaji Kecil, Imbalannya Surga

Beredar postingan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar yang seolah berasal dari situs berita berjudul "Tak Punya Solusi Soal Honorer Ma'ruf Amin Guru Maklumi Gaji Kecil Dengan Imbalan Surga".

Faktanya judul dalam postingan tersebut telah diubah oleh oknum. Dari penelusuran ditemukan berita tayang di situs pikiran-rakyat.com dengan judul asli "Ma'ruf Amin Syukuri Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Minta Ulama Jaga NKRI", diunggah pada 20 Januari 2019.

## Anjing dan Kucing Tidak Bisa Menularkan Virus Corona

# 10

Beredar informasi di media sosial Facebook bahwa WHO menyebut kucing dan anjing tidak bisa menularkan Virus Corona. Dalam narasi disebutkan tidak ada/belum ada rekam medis Virus Corona ditularkan dari hewan domestik ke manusia.

Berdasarkan penelusuran, pihak WHO membantah informasi bahwa anjing dan kucing tidak bisa menularkan Virus Corona. Dalam artikel yang dilansir dari situs <https://factcheck.afp.com/> disebutkan bahwa anjing dapat terinfeksi Canine Coronavirus, yang menyebabkan diare, muntah, dan gangguan usus pada anjing. Virus ini lalu menyebar melalui feses, terutama saat anak anjing makan tinja. Anjing juga dapat terinfeksi Virus Corona yang menyerang pernapasan, sehingga membuatnya batuk, bersin, dan mengeluarkan lendir.

# 9



## Para Camat di Cilacap Dapat Fasilitas Pesawat Terbang

Beredar di media sosial video para Camat di Kabupaten Cilacap yang berpose di depan pesawat, disertai narasi "Setiap Camat di Kab. Cilacap mendapatkan 1 pesawat terbang sbg kendaraan operasional. Cilacap keren nih"

Faktanya, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf menyatakan bahwa video tersebut hanyalah sekedar candaan, sebab menurutnya tidak mungkin menganggarkan satu Camat satu pesawat. Dijelaskan bahwa pesawat tersebut merupakan pesawat latih milik Perkasa Flying School, dan video diambil selepas para Camat melakukan olahraga di Bandara Tunggul Wulung.



# WASPADA



## Klaster Perkantoran! Tertiblah Sejak Dari Rumah

Guna menekan munculnya klaster perkantoran, perlu bersama tertib **#PakaiMasker #JagaJarak #CuciTanganPakaiSabun**. Lakukan panduan kesehatan sejak berangkat dari rumah, saat bekerja, istirahat makan siang hingga kembali ke rumah.

Sumber : covid19.go.id



**Pandemi COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia harus bisa dijadikan momentum untuk transformasi digital.**



**Pandemi mengubah cara kerja, cara beraktivitas, belajar, hingga cara bertransaksi dari luring (*offline*) dengan kontak fisik menjadi lebih banyak daring (*online*).**

Perlu segera diantisipasi, disiapkan, direncanakan secara matang. Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.



*Presiden Joko Widodo*



Sumber foto : Antara Foto



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9  
Jakarta Pusat, 10110  
(021)3452841  
majalahkominfonext@kominfo.go.id